

info

DANA PENSIUN



EDISI 117
MARET - APRIL 2025



TATA ULANG PORTOFOLIO ERA PERANG DAGANG

MUSYAWARAH NASIONAL,
SEMINAR NASIONAL, DAN
MUSYAWARAH NASIONAL LUAR
BIASA ADPI TAHUN 2025

“MENYIKAPI DAMPAK
KEBIJAKAN
TARIF 2.0 DONALD TRUMP:
TANTANGAN DAN PELUANG
GLOBAL”

MUTASI PROGRAM PPMP
KE PPIP, KEUNGGULAN DAN
TANTANGANNYA



Selamat Ulang Tahun

DANA PENSIUN YANG BERDIRI BULAN MARET & APRIL

NAMA DANA PENSIUN

TANGGAL PENDIRIAN DANA PENSIUN

MARET

1	Dana Pensiun Konferensi Waligereja Indonesia	06 Maret 1975
2	Dana Pensiun Syariah DAPERSI	13 Maret 1995
3	Dana Pensiun Pegawai UHAMKA	15 Maret 2012
4	Dana Pensiun Bank KB Bukopin	19 Maret 1987
5	Dana Pensiun Sido Muncul	24 Maret 2011
6	Dana Pensiun Konimex	25 Maret 1993
7	Dana Pensiun Semen Gresik	27 Maret 1974
8	Dana Pensiun Pegawai Pembangunan Jaya Group	27 Maret 1991
9	Dana Pensiun PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat	20 Maret 1974
10	Dana Pensiun Triputra	13 Maret 1974
11	Dana Pensiun Bank Sumsel Babel	31 Maret 1974

APRIL

1	Instansi	Tanggal Pendirian
2	Dana Pensiun Sint Carolus	01 April 1973
3	Dana Pensiun Pelni	01 April 1974
4	Dana Pensiun Bank NTT	01 April 1990
5	Dana Pensiun Bank Riau Kepri	01 April 1993
6	Dana Pensiun Jasa Marga	03 April 1991
7	Dana Pensiun Tigaraksa Satria	05 April 1993
8	Dana Pensiun Bank Negara Indonesia	06 April 1960
9	Dana Pensiun Goodyear Indonesia	06 April 1993
10	Dana Pensiun Karyawan Indocement Tunggal Prakarsa	07 April 1990
11	Dana Pensiun Karyawan Taspen	08 April 1993
12	Dana Pensiun Krama Yudha Tiga Berlian Motors	08 April 1993
13	Dana Pensiun Smart	13 April 1993
14	Dana Pensiun Karyawan Pupuk Kujang	13 April 1993
15	Dana Pensiun Karyawan Staf PT Kebon Agung	13 April 1995
16	Dana Pensiun Eveready Indonesia	13 April 1995
17	Dana Pensiun Bank DKI	14 April 1993
18	Dana Pensiun Krama Yudha Tiga Berlian Motors	15 April 1993
19	Dana Pensiun Manfaat Pasti Unilever Indonesia	15 April 1993
20	Dana Pensiun BPD Bengkulu	16 April 1993
21	Dana Pensiun PT Bank Aceh	21 April 1993
22	Dana Pensiun Pupuk Kaltim	24 April 2008

REDAKSI

Penasihat:
Mudjiharno M. Sudjono

Pemimpin Umum:
Abdul Hadi

Wakil Pemimpin Umum:
Budi Sutrisno

Pemimpin Redaksi:
Arif Hartanto

Redaktur Pelaksana:
Aloy Tagawai

Sekretaris Redaksi:
Budi Sulistijo

Dewan Redaksi:
Bambang Sri Mulyadi, Asmorohadi,
Purwaningsih, Nugroho Dwi Priyohadi,
Fajar Gustaf Suwandi

Kuangan:
Heru Azam Zamzami

Pemasangan Iklan:
Marissa Renimas Harlandea

Fotografer:
Nisa Qurratu 'Ain

Sirkulasi/Distribusi:
M. Subandi

ALAMAT REDAKSI:

Gedung Wisma 46 Kota BNI Lantai 3, Suite 3.05
Jln Jenderal Sudirman Kav. 1 - Jakarta 10220
Telp. (021) 251 4761, 251 4762, **Faks:** 251 4760
E-mail: adpibusat@adpi.or.id

PENERBIT:

PT JAGATMEDIA & BISNIS

**MENGOPTIMALKAN PELUANG
DI BALIK DAMPAK GEJOLAK TARIF TRUMP**



Dunia dibuat panik oleh rencana Presiden AS, Donald Trump yang akan menerapkan tarif pajak “gila-gilaan” untuk banyak negara, termasuk Indonesia. Respons kepanikan terekspresi di pasar keuangan dunia, terutama bursa saham. Kepanikan melanda seluruh dunia, tak terkecuali di Wall Street.

Walau Trump akhirnya memutuskan menunda penerapan hingga 90 hari, kepanikan belum mereda. Gerak pasar mencari keseimbangan baru belum akan berujung. Asumsinya, perekonomian banyak negara akan dibuat “demam” oleh langkah Trump ini, termasuk perekonomian Indonesia.

Yang jelas, langkah Trump itu bisa dikatakan sudah makan korban. Indeks Harga saham Gabungan (IHSG) sempat rontok nyaris 600 poin dan IHSG sempat jebol di bawah level psikologis 6.000.

Pemerintah pun meresponsnya dengan mengumpulkan para pelaku ekonomi dari berbagai sektor. Tujuannya meredam kepanikan. Di sisi lain, pemerintah juga berupaya mengkomunikasikan langkah-langkah mengatasi dampak kebijakan tarif Trump serta jurus untuk mengoptimalkan peluang dari krisis yang terjadi.

Di balik krisis selalu ada peluang, termasuk memanfaatkan momentum untuk mengoptimalkan keuntungan investasi. Kecermatan ekstra Pengurus Dana Pensiun tetap dibutuhkan. Isu ini menjadi laporan utama edisi ini.

Selamat membaca.

Wasallam
Redaksi

DAFTAR ISI >>

UTAMA (HAL 4 - 11)

IDX COMPOSITE
5,912.06
-9.19% -598.56
TRADING VOLUME: 1,591 M
TRADING VALUE: 1,926 B

MEMBACA ARAH INVESTASI ERA PERANG TARIF

SINYAL POSITIF NEGOSIASI TARIF INDONESIA-AS

TOP 5 GAINERS			TOP 5 FREQ		
STOCK	PRICE	Δ	STOCK	PRICE	Δ
1. BAI	▲		IBCA	▼	7,400
2. ASDM	▲	34	BRI	▼	3,460
3. UANG	▲	30	IRI	▼	4,500
4. CYBR	▲	10	CIO	▼	71
5. KLIAS	▲		M	▼	2,050

- 12** [KOLOM] Oleh: Budi Sutrisno
“Menyikapi Dampak Kebijakan Tarif 2.0 Donald Trump: Tantangan dan Peluang Global”
- 17** [KOLOM] Oleh: Budi Sutrisno
Circuit Breaker 18 Maret 2025: Gejolak Pasar Saham Indonesia di tengah isu Global dan Domestik
- 20** [KOLOM] Oleh: Praska Putrantyo
Implementasi Asset-Liability Management pada Investasi Dana Pensiun
- 22** [KOLOM] Nugroho Dwi Priyohadi
Pengembangan SDM Dapen yang Benar Dengan Benar, Bagaimana Caranya?
- 26** [KOLOM] Oleh: Siti Rakhmawati
Implementasi Keuangan Berkelanjutan Di Indonesia^{*)}
- 29** [KOLOM] Oleh: Nugroho Dwi Priyohadi
Mutasi Program PPMP Ke PPIP, Keunggulan dan Tantangannya

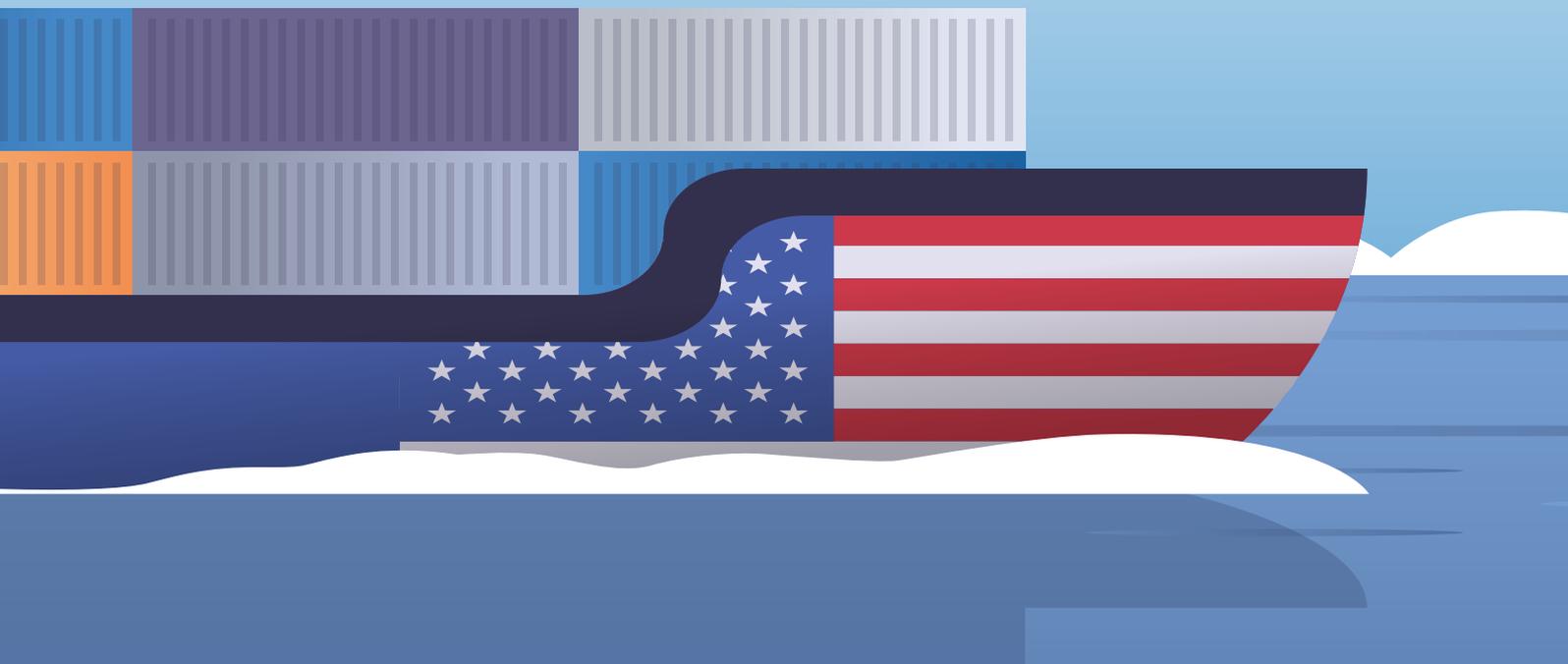
- 32** [KOLOM] Oleh: Arif Hartanto SH, MH
LSP Dana Pensiun Paska POJK Nomor 3 Tahun 2025
- 39** [KOLOM] Oleh: R Herna Gunawan
Membangun Budaya Sadar Risiko dengan Mengidentifikasi Loss Event Database (LED)

EKSPOSE (HAL 42 - 47)

- HALAL BIHALAL ADPI
- MUSYAWARAH NASIONAL (MUNAS) TAHUNAN I/2025 ADPI
- SEMINAR NASIONAL ADPI
- MUSYAWARAH NASIONAL LUAR BIASA (MUNASLUB) ADPI TAHUN 2025



MEMBACA ARAH INVESTASI ERA PERANG TARIF



Pemerintah berupaya keras merespons secara proporsional dampak perang tarif pada perekonomian maupun investasi. Selain berupaya melobi Amerika, pemerintah juga membuka peluang keran investasi dari berbagai negara di luar AS. Bagaimana implikasinya pada peluang investasi portofolio?

Aktivitas perdagangan di Bursa Efek Indonesia (BEI) kembali dibuka, Selasa (8/4/2025), atau sehari setelah liburan Lebaran. Beberapa detik setelah opening bell dibunyikan, indeks harga saham gabungan (IHSG) langsung rontok 598,56 poin atau 9,19% ke posisi 5.912,06. Bisa dikatakan ini merupakan angka penurunan indeks tertinggi yang pernah terjadi di BEI.

Penurunan ini memaksa manajemen BEI menerapkan aturan trading halt, atau penghentian sementara perdagangan selama 30 menit, karena IHSG telah terpangkas lebih dari angka maksimal 8%. Angka 8% merupakan batas baru trading halt setelah sebelumnya berlaku maksimal penurunan 5%.





Presiden Prabowo Subianto saat acara Sarasehan Ekonomi bersama Presiden RI yang mengusung tema “Memperkuat Daya Tahan Ekonomi Nasional Di Tengah Gelombang Tarif Perdagangan” Jakarta, Selasa [8/4/2025]. Foto: Dok. Investortrust

Kepanikan pasar saham yang merespons kebijakan tarif pajak resiprokal Presiden Amerika Donald Trump yang ugal-ugalan itu sudah bisa diduga sebelumnya. Meski aktivitas perdagangan sempat jeda karena libur hari raya Idul Fitri, kepanikan investor justru tidak mereda. Bursa saham global yang tidak melewati jeda transaksi, sudah merefleksikan kepanikan yang sama selama empat hari perdagangan berturut-turut, sebelum akhirnya rebound.

Pemerintahan Presiden Prabowo dan jajaran menteri kabarnya sudah memantau keresahan itu yang juga sudah disuarakan berbagai pihak. Itu sebabnya, berbagai pihak dimintai membantu mempertemukan para pelaku ekonomi dari segala lini untuk bertemu dalam satu forum dengan Presiden Prabowo

dan jajarannya.

Seorang sumber mengatakan, pihaknya diminta bantuan mengusulkan partisipan, khusus dari kalangan fund manager, kepala riset sekuritas, serta ekonom. Penyelenggara forum juga memobilisasi para pelaku usaha dari berbagai sektor, asosiasi industri, asosiasi pengusaha, para CEO, banker, hingga pimpinan serikat buruh, dikumpulkan dalam acara sarasehan.

Saresehan Ekonomi yang bertajuk “Memperkuat Daya Tahan Ekonomi di Tengah Gelombang Perang Tarif Perdagangan” itu pun digelar di Menara Mandiri, Jakarta, Selasa (8/4/2025). Acara berlangsung hanya beberapa jam setelah kepanikan pelaku pasar merontokkan IHSG di BEI nyaris 600 poin.

Pada kesempatan ini, Presiden Prabowo dan para Menteri dan pimpinan Lembaga berupaya meyakinkan pasar, bahwa pemerintah sudah menyiapkan sejumlah langkah penting mencegah krisis lebih lanjut. Pemerintah juga menegaskan, berbagai indikator ekonomi mencerminkan bahwa fundamental ekonomi masih cukup kuat dan perekonomian berada dalam fase ekspansif.

Ditegaskan, fase terburuk sebenarnya telah terlewati dan hampir seluruh indikator menunjukkan pembalikan dalam tren positif (turn around), baik menyangkut kondisi fiskal (APBN), moneter, perbankan, maupun sektor riil. Ekonomi domestik yang didominasi konsumsi menjadi pilar penyangga yang andal menghadapi ketidakpastian global,

termasuk pemberlakuan tarif baru Presiden Trump.

Ada indikasi positif untuk ruang negosiasi, ketika Trump kemudian menyatakan menunda penerapan hingga 90 hari ke depan. Untuk kepentingan negosiasi, ketika berita ini ditulis, Selasa (15/4) pemerintah Indonesia telah mengirimkan delegasi yang dipimpin Menko Perekonomian Airlangga Hartarto.

Langkah pemerintah ini, menurut Presiden Prabowo, merupakan bukti Pemerintah berkomitmen penuh pada upaya mendorong pemulihan ekonomi.

gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK).

Selain upaya bernegosiasi dengan AS, Presiden Prabowo menegaskan, situasi yang dialami dunia saat ini menjadi momentum untuk membangun ekonomi secara mandiri. Seiring dengan itu, Prabowo minta semua regulasi yang tidak masuk akal ditinjau dan dibenahi. “Permudah semua proses untuk pengusaha. Lakukan demi rakyat Indonesia,” imbau Presiden kepada jajaran menteri.

Sepakat dengan Presiden, Menteri Keuangan, Sri Mulyani menyatakan,

Vietnam. Ia menyebutnya copy with pride. Cukup satu negara yang dijadikan benchmark, yakni Vietnam. “Apapun kelebihan yang diberikan pemerintah Vietnam kepada dunia usaha, kontek saja secara eye to eye, point to point,” tegas Presiden.

Untuk mengatasi risiko pemutusan hubungan kerja, pemerintah telah membentuk Satuan Tugas Pemutusan Hubungan Kerja (Satgas PHK). Seiring dengan itu, Pemerintah menginvestasikan anggaran besar-besaran di bidang pertanian yang ditargetkan menyerap 8 juta lapangan kerja.

STIMULUS EKONOMI

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan bahwa perekonomian Indonesia tetap berpeluang tumbuh positif. Selama 2024, perekonomian Indonesia tumbuh 5,03%, dan semua sektor tumbuh positif. Kontribusi pertumbuhan terbesar datang dari industri pengolahan manufaktur sebesar 18,98% dari PDB. Sedangkan inflasi secara yoy hanya 1,03%, serta Indeks Keyakinan Konsumen 126,4, dan PMI 52,4 pada Maret 2025.

Indikator positif lainnya seperti neraca pembayaran tahun 2024 surplus US\$ 7,2 miliar. Sedangkan surplus perdagangan Februari US\$ 3,12 miliar, melanjutkan tren surplus 58 bulan berturut-turut. Sampai dengan Februari 2025, pertumbuhan kredit mencapai 10,4% yoy dan DPK perbankan meningkat 5,75%.

Saat ini, Indonesia menempati peringkat layak investasi dengan daya saing kuat. Peringkat daya saing Indonesia naik ke-27 dari 67 negara atau naik 7 tingkat menurut IMD Global Competitiveness Index. Ini menempatkan Indonesia berada di peringkat ketiga ASEAN setelah Singapura dan Thailand.

Airlangga juga menegaskan, sovereign credit rating (CSR) Indonesia saat ini berada satu tingkat di atas investment grade, seperti direkomendasikan beberapa lembaga rating internasional.



Jajaran Menteri saat menyimak uraian Presiden Prabowo Subianto.

Foto: Dok. Biro Pers Sekretariat Presiden

Kebijakan tarif resiprokal Trump mendorong pemerintah untuk menempuh kebijakan deregulasi dan reformasi yang komprehensif. Sasarannya melindungi sekaligus mendorong dunia usaha dengan memangkas regulasi yang tidak masuk akal dan menyulitkan pengusaha.

Pemerintah juga menegaskan, stimulus ekonomi akan dilanjutkan untuk mendorong perekonomian. Upaya penciptaan lapangan kerja juga digiatkan untuk mengantisipasi kemungkinan

kebijakan tarif AS menjadi momentum untuk melakukan deregulasi dan reformasi menyeluruh. Menkeu berharap, seluruh jajaran kabinet untuk mengelola kebijakan secara baik, dengan tujuan agar memberi ketenangan kepada masyarakat. “Jangan menambah keresahan yang tidak perlu, sementara secara fundamental perekonomian bagus,” tegas Sri Mulyani.

Agar investasi menjadi motor pertumbuhan, Presiden mengimbau para Menteri untuk menyontek langkah

Moody's memberikan peringkat Baa2 dengan outlook stabil, Fitch BBB dengan outlook stabil, S&P peringkat BBB dengan outlook stabil, dan R&I peringkat BBB+ dengan outlook stabil. "Moody's menyebutkan, ketahanan ekonomi Indonesia terjaga berkat permintaan domestik yang kuat dan komitmen pemerintah dalam menjaga kredibilitas kebijakan moneter dan fiskal," ujar Airlangga.

La menambahkan, untuk menggerakkan ekonomi, pemerintah telah memberikan stimulus ekonomi dalam bentuk diskon tarif listrik pada awal tahun, subsidi motor listrik, dan relaksasi PPN sektor properti. "Pemerintah juga menyiapkan program Kredit Usaha Rakyat (KUR) Rp 300 triliun termasuk untuk sektor padat karya, seperti makanan minuman dan industri TPT. Plafon kreditnya Rp 500 juta sampai Rp 10 miliar, dengan bunga disubsidi sebesar 5%," demikian Airlangga.

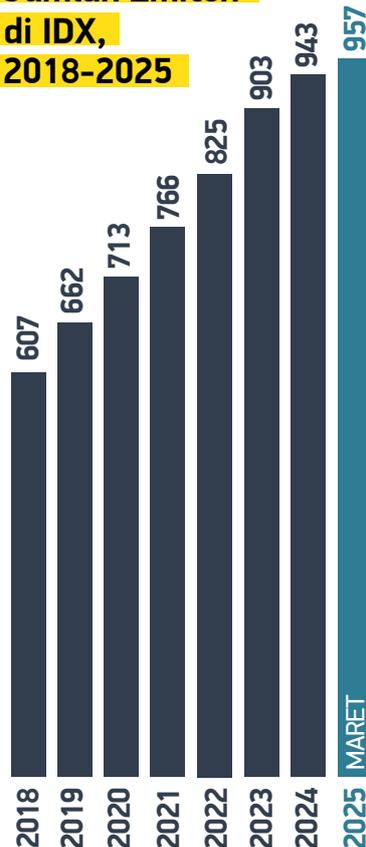
Pada kesempatan sarasehan ini, Menteri Keuangan Sri Mulyani juga menjamin APBN masih tetap terjaga sebagai anchor of confidence. APBN tidak akan jebol akibat berbagai program langsung ke masyarakat seperti subsidi (pupuk, BBM, listrik) dan Makanan Bergizi Gratis (MBG), pemeriksaan kesehatan gratis, pembangunan koperasi desa dsb. "Semua dana sudah siap," tegas Menkeu.

Merespons pesimisme soal Danantara, Menkeu memastikan bahwa Lembaga ini akan dikelola secara pruden. Penggunaan dividen BUMN untuk Danantara sudah diperhitungkan pemerintah. "Danantara telah memiliki sistem whistle blower dan oversight yang cukup kuat sehingga tidak ada konflik kepentingan, serta bebas korupsi," lanjut Menkeu.

Sinyal positif untuk kiprah Danantara juga bisa terlihat dari hasil kunjungan Presiden Prabowo ke Timur Tengah. Rangkaian kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke negara-negara Timur Tengah dan Turkiye sejak 9 sampai dengan 14 April 2025 menghasilkan setidaknya 17 perjanjian antara Pemerintah RI dengan



Jumlah Emiten di IDX, 2018-2025



Jumlah Investor Pasar Modal Terus Meningkat

Data perkembangan jumlah nomor tunggal identitas investor¹ pasar modal Indonesia atau *Single Investor Identification (SID)*, 2020–2025². Jumlah investor meningkat, dengan investor terbanyak pada instrumen reksa dana.



Catatan:

¹ Data investor pasar modal merupakan jumlah investor unik dari reksadana, saham, surat berharga negara (SBN) dan obligasi korporasi. Satu investor dapat memiliki lebih dari satu instrumen investasi.

² Data 2025 sampai Februari.

Sumber: KSEI/ investortrust.id

pemerintah masing-masing negara.

Menkeu juga melihat sisi peluang dari kebijakan tarif yang tengah ramai diperbincangkan. Menurut Sri Mulyani, kebijakan tarif AS berpotensi memicu trade diversion atau peralihan jalur perdagangan global. Banyak negara kini mencari pasar ekspor dan destinasi investasi baru di luar dominasi AS yang hanya mencakup 25% dari total perdagangan dunia.

“Indonesia punya peluang besar untuk mengambil alih posisi negara lain seperti Vietnam, Bangladesh, dan Thailand, yang tarif balasannya terhadap AS relatif lebih tinggi,” beber Sri Mulyani.

PELUANG PASAR SAHAM

Divisi riset BRI Danareksa melihat masih relatif lebih baik, dibandingkan negara emerging market lainnya, dalam menghadapi risiko perang dagang. Hal ini didukung eksposur ekspor terhadap PDB hanya berkisar 22%.

Kebijakan Trump tersebut juga diprediksi hanya berdampak kecil

“**HINGGA PERIODE AKHIR KUARTAL PERTAMA 2025, PASAR SURAT UTANG KORPORASI SUDAH ADA PENERBITAN SEKITAR RP46,7 TRILIUN, DI ANTARANYA RP46,4 TRILIUNNYA DARI INSTRUMEN YANG BERBENTUK OBLIGASI KORPORASI DAN JUGA SUKUK.**”

terhadap prospek kinerja keuangan emiten tahun ini, khususnya sektor energi dan komoditas akibat peluang penurunan permintaan global.

BRI Danareksa Sekuritas memperkirakan emiten sejumlah sektor, seperti sektor consumer, ritel, dan otomotif akan terpapar penurunan nilai tukar rupiah. Pelemahan rupiah berpotensi menekan pendapatan dan margin keuntungan untuk sementara waktu. Namun dengan potensi perlambatan

pertumbuhan ekonomi dunia, harga bahan baku produk consumer relatif stabil dan akhirnya bisa membuka ruang terhadap stabilitasi margin keuntungan. Dengan demikian pertumbuhan volume penjualan diprediksi berlanjut.

Pada sisi lain, gonjang-ganjing perang tarif telah memicu penurunan harga saham, tak terkecuali saham dengan fundamental bagus. Pada momen seperti itu, prinsip sederhana mengatakan, langkah yang bijak adalah membeli secara bertahap. Dalam berbagai kesempatan, investor kawakan, Lo Kheng Hong mengatakan, penurunan harga saham yang dipicu isu perang tarif merupakan momen yang baik untuk membeli saham bagus.

Saham bagus dalam konteks ini adalah saham dengan kinerja mumpuni, dan telah turun tajam dari nilai bukannya. Ia mengaku, saham favoritnya saat dari sektor perbankan. Pilihannya beragam.

Alasannya, beberapa bank tersebut tersebut didukung laba yang sangat besar. Pilihannya seperti saham Bank BRI (BBRI), Bank CIMB Niaga (BNGA), Bank OCBC (NISP), maupun Bank Danamon (BDMN). Ia juga menjagokan beberapa saham dari industri batu bara seperti ABM Investama dengan kode ABMM.

BRI Danareksa Sekuritas memperkirakan, pada era perang tarif, indeks harga saham gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia (BEI) cenderung bergerak dalam rentang 5.900-6.700. Adapun saham yang layak masuk kategori “safe heaven” untuk saat ini meliputi saham Bank BCA (BBCA), saham produk konsumen seperti Indofood CBP (ICBP), saham GOTO, Bank Syariah Indonesia (BRIS), maupun Trimegah Bangun Persada (NCKL) yang terkait dengan tren kenaikan harga emas dunia.

Analisis BRI Danareksa Sekuritas Erindra Krisnawan memberi catatan bahwa potensi pergerakan tersebut mempertimbangkan risiko volatilitas nilai tukar dan kenaikan yield obligasi. Tren pergerakan indeks tersebut juga



IHSG sempat rontok.

mempertimbangkan berlanjutnya penurunan kepemilikan investor asing di pasar saham menjadi 17%.

Meski demikian, diakui bahwa angka tersebut masih berada di atas level terendah kepemilikan asing pada momen Covid-19 tahun 2020-2021. Saat itu, porsi saham investor asing hanya sekitar 12,5%. “Kami menyarankan pemodal untuk tetap memegang saham-saham defensive dan memiliki nama yang kuat, seperti BBCA, ICBP, GOTO, BRIS, dan NCKL,” demikian pandangan divisi riset BRI Danareksa Sekuritas.

BRI Danareksa Sekuritas merekomendasikan beli saham BBCA dengan target harga Rp 11.900, saham ICBP direkomendasikan beli dengan target harga Rp 14.00, dan saham GOTO direkomendasikan beli dengan target harga Rp 110.

Danareksa Sekuritas juga merekomendasikan beli saham BRIS dengan target harga Rp 2.900 dan saham NCKL dengan target harga Rp 1.500. Sedangkan risiko utama terhadap pergerakan saham datang dari berlanjutnya pelemahan nilai tukar rupiah.

TREN PASAR OBLIGASI

Meski ada risiko perang tarif, pasar surat utang korporasi relatif

masih semarak, setidaknya sampai dengan akhir kuartal pertama 2025. PT Perneringkat Efek Indonesia (Pefindo) mencatat total penerbitan surat utang korporasi secara keseluruhan pada Januari-Maret 2025 mencapai Rp46,7 triliun.

“Hingga periode akhir kuartal pertama, pasar surat utang korporasi sudah ada penerbitan sekitar Rp46,7 triliun, di antaranya Rp46,4 triliunnya dari instrumen yang berbentuk obligasi korporasi dan juga sukuk,” ujar Kepala Divisi Riset Ekonomi Pefindo, Suhindarto dalam konferensi pers secara virtual di Jakarta, Selasa (15/4/2025).

Bandingkan dengan nilai penerbitan obligasi korporasi dan sukuk pada periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp25,1 triliun. Sementara itu, penerbitan Medium Term Notes (MTN) cenderung turun menjadi Rp400 miliar dibandingkan Rp700 miliar pada periode yang sama tahun sebelumnya.

“Jadi, all in all sebenarnya kondisi pasar surat utang korporasi di triwulan pertama tahun ini memang relatif lebih semarak dibandingkan dengan di kuartal pertama di tahun 2024 lalu,” beber Suhindarto.

Tujuan penggunaan dana sebagian besar untuk refinancing sebesar

53,6 persen dan modal kerja 41,5 persen. Pefindo juga melihat peluang penerbitan obligasi baru masih cukup besar. Sampai 31 Maret 2025, Pefindo telah mengantongi mandat penerbitan obligasi senilai Rp74,46 triliun.

Dari total nilai tersebut, mayoritas dari sektor multifinance dengan 10 perusahaan. Rencana penerbitan tahun ini untuk sektor multifinance mencapai Rp14,6 triliun. Dari sektor perbankan aka nada 5 perusahaan perbankan dengan nilai emisi Rp12,6 triliun.

Selanjutnya ada dua perusahaan lembaga keuangan khusus dengan nilai emisi senilai Rp10,5 triliun, enam perusahaan induk sebesar Rp7 triliun, dan enam perusahaan pertambangan Rp6,4 triliun. Sektor-sektor lainnya memiliki rencana emisi di bawah Rp3 triliun.

Sebaran emisinya dalam bentuk PUB obligasi senilai Rp52,43 triliun, obligasi Rp9,5 triliun, PUB sukuk Rp7,94 triliun, sukuk Rp2,28 triliun, MTN Rp2 triliun, dan sekuritisasi Rp300 miliar.

Dari keseluruhan mandat yang diterima Pefindo, perusahaan sektor swasta atau non-BUMN sebanyak 33 perusahaan dengan nilai emisi sebesar Rp37,62 triliun. Sedangkan dari kelompok BUMN serta anak perusahaan (BUMD) sebesar Rp36,83 triliun. □

SINYAL POSITIF NEGOSIASI TARIF INDONESIA-AS

Pemerintah Indonesia bergerak cepat mengamankan kepentingan Indonesia dari dampak kebijakan tarif resiprokal oleh AS. Selain pilihan produk impor, Indonesia juga menawarkan **kemudahan investasi, dengan sasaran mengamankan kepentingan Indonesia.**

Negosiasi tarif resiprokal antara pemerintah Amerika Serikat dengan Indonesia perlahan mulai menunjukkan sinyal menggembirakan. Pemerintah Indonesia telah kabar terbaru terkait negosiasi tarif dagang timbal balik (resiprokal) 32% Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump. Meski rencana kebijakan tarif Trump diundur 90 harimeski kemudian ditunda 90 hari, pemerintah terus berupaya mengamankan kepentingan Indonesia.

Sebelumnya, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto memimpin rombongan negosiasi ke Washington DC, AS pada 16-23 April 2025. Tim yang membantu negosiasi adalah Menteri Luar Negeri Sugiono, Wakil Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Mari Elka Pangestu, Wakil Menteri Luar Negeri Arrmanatha Nasir, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dan Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono.

Menlu Sugiono mengatakan, mendorong penguatan kerja sama ekonomi Indonesia dan AS, termasuk dalam konteks rantai pasok. Dalam konteks itu, Indonesia mengundang investor AS berinvestasi di sektor mineral kritis, seperti nikel, dan sektor-sektor penting lain.

“Pemerintah Indonesia banyak melakukan langkah-langkah deregulasi untuk mempermudah dan menciptakan situasi kondusif bagi investor asing,” ujar Menlu Sugiono dalam pernyataan resminya, Kamis (17/4/2025).

Komitmen tersebut disampaikan dalam pertemuan bilateral Menlu Sugiono dengan Menlu AS Marco Rubio, di Kementerian Luar Negeri AS, Washington DC, pada Rabu (16/4/2025). Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari komunikasi telepon kedua Menlu pada Januari 2025 lalu.

Kepada Rubio, Menlu Sugiono menyampaikan berbagai prioritas dan program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, di antaranya ketahanan pangan dan energi, hilirisasi, serta pembangunan sumber daya manusia. “Sejumlah prioritas tersebut membuka peluang kerja sama konkret dengan Pemerintah AS,” tutur Sugiono.

Merespons langkah Indonesia, AS memberi kesempatan pertama untuk bernegosiasi “Indonesia adalah salah satu negara yang mendapat kesempatan pertama untuk diundang ke Washington DC,” ujar Airlangga sebelum keberangkatan delegasi Indonesia.

Tiga kementerian AS ditargetkan Pemerintah Indonesia untuk bernegosiasi, yakni Kementerian Keuangan AS, Kementerian Perdagangan AS, dan Kementerian Sekretariat Negara AS. Proses negosiasi ini dilakukan untuk menemui sejumlah pejabat tinggi AS, di antaranya Menteri Perdagangan AS Howard Lutnick, Menteri Sekretariat Negara AS Marco Rubio, dan Menteri Keuangan AS Scott Bessent.

Pemerintah Indonesia berencana mengompensasikan surplus perdagangan dengan Amerika Serikat (AS) yang mencapai US\$ 17 miliar atau Rp 285 triliun (kurs Rp 16.800) dengan membeli sejumlah produk AS. Salah satunya komponen kilang minyak (refinery). “Indonesia akan membeli barang dari AS sesuai kebutuhan Indonesia. Nilainya mendekati (US\$ 17 miliar)” kata Airlangga, di kantornya, Jakarta, Senin (14/4/2025).

Selain dua komoditas itu, pemerintah juga akan meningkatkan impor kapas dan produk minyak dan gas. “Di samping itu, Indonesia juga sedang mengerjakan proyek strategis nasional (PSN) mengenai pembangunan refinery (minyak) dan mungkin salah satu komponennya kita beli dari Amerika,” ujar dia.

Komponen-komponen utama dalam suatu pabrik penyulingan minyak (refinery) meliputi tangki, unit distilasi, fasilitas pemulihan gas dan hidrokarbon ringan, serta sistem utilitas, seperti instalasi uap, listrik, dan pengolahan air.

Kementerian Perdagangan akan mempertebal volume impor produk AS dengan melakukan beragam kajian. Selain itu, pemerintah juga mengidentifikasi negara tujuan ekspor Indonesia. Meski begitu, pemerintah belum dapat memastikan tujuan ekspor tersebut.

Airlangga menjelaskan, pemerintah sedang menyiapkan non-paper untuk negosiasi dengan AS, terkait non-trade measures atau non-tariff barrier. Salah satunya deregulasi berbagai aturan, termasuk ekspor, impor, dan sebagainya. □



Menteri Luar Negeri RI, Sugiono dengan Menlu AS, Marco Rubio bersalaman jelang melakukan pertemuan bilateral di Kementerian Luar Negeri AS, Washington D.C., pada Rabu (16/4/2025).



Oleh: **Budi Sutrisno**
Direktur Utama Dana Pensiun BCA

“MENYIKAPI DAMPAK KEBIJAKAN TARIF 2.0 DONALD TRUMP: TANTANGAN DAN PELUANG GLOBAL”

LATAR BELAKANG

Dalam pernyataan resmi pada 2 April 2025, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan kebijakan tarif impor baru yang akan berlaku mulai 5 April 2025. Kebijakan ini menetapkan tarif dasar sebesar 10% bagi hampir seluruh barang impor, dengan pengecualian untuk komoditas tertentu seperti obat-obatan, semikonduktor, dan mineral strategis. Langkah ini menandai eskalasi baru dalam pendekatan proteksionisme ekonomi yang diusung pemerintah AS.

Selain tarif dasar, kebijakan tersebut juga mencakup tarif tambahan sebesar 25% yang dikenakan khusus untuk mobil impor mulai 23 April 2025, serta suku cadang otomotif yang mulai diberlakukan pada 3 Mei 2025. Penerapan tarif ini dimaksudkan untuk memperkuat industri manufaktur dalam negeri dan mengurangi ketergantungan pada produk asing, terutama dari negara-negara mitra dagang utama.

Namun, kebijakan ini memicu penerapan tarif resiprokal dari negara-negara mitra dagang, termasuk Indonesia. Sebagai respons, produk Indonesia

yang masuk ke pasar AS dikenakan tarif sebesar 32%, efektif mulai 9 April 2025. Kondisi ini diperkirakan akan memberikan tekanan terhadap daya saing ekspor Indonesia di pasar global, khususnya untuk produk yang selama ini bergantung pada pasar AS.

Secara umum, tarif merupakan pajak atau bea masuk yang dikenakan terhadap barang impor. Dalam praktiknya, beban tarif biasanya dialihkan kepada konsumen melalui kenaikan harga barang, sehingga dampaknya tidak hanya dirasakan oleh pelaku usaha, tetapi juga oleh konsumen akhir di negara pengimpor. Kebijakan ini tidak hanya bersifat ekonomi, tetapi juga berpotensi menimbulkan dampak sosial dan politik yang lebih luas.

Tarif impor yang diberlakukan AS terhadap Indonesia mencapai 32%. Karena ekspor Indonesia ke AS hanya sekitar 1,5%-2,2% dari total PDB, dampak langsung akan terbatas. Namun dampak tidak langsung bisa cukup besar jika tarif AS yang dikenakan terhadap berbagai negara lain akhirnya memperlambat ekonomi global dan menekan permintaan akan ekspor dari Indonesia, khususnya dari Cina yang merupakan mitra dagang utama kita.

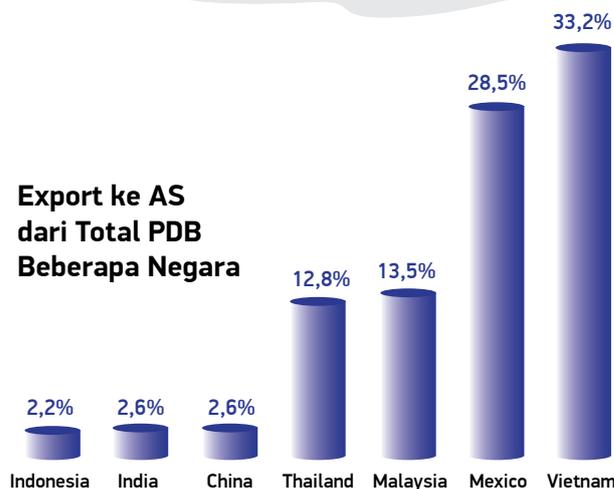
Neraca perdagangan Indonesia dan Amerika Serikat

Ekspor Indonesia ke AS hanya sekitar 1,5%-2,2% dari total PDB. Neraca perdagangan Indonesia dan Amerika Serikat bisa kita lihat dalam angka pada tabel 1. Maka berdasarkan data tabel 1 tersebut, pengaruh hubungan dagang Indonesia dengan Amerika Serikat terhadap perekonomian nasional relatif tidak terlalu besar dan masih dalam kondisi yang terkendali. Hal ini tercermin dari kontribusi ekspor Indonesia ke AS yang hanya berkisar antara 1,5% hingga 2,2% terhadap total Produk Domestik Bruto (PDB). Namun demikian, kebijakan tarif tinggi yang kembali diterapkan oleh Amerika Serikat, yang dikenal sebagai “Trump Tarif 2.0”, telah memberikan dampak besar terhadap situasi global secara keseluruhan.

Salah satu dampak utama dari kebijakan tersebut adalah gejolak pasar keuangan global. Beberapa indikasinya meliputi kejutan yang terjadi di berbagai bursa saham dunia serta pelemahan nilai tukar mata uang di negara-negara berkembang (emerging markets). Selain itu, kebijakan ini juga menyebabkan gangguan pada perdagangan dunia,



Export ke AS dari Total PDB Beberapa Negara



[TABEL 1] NERACA PERDAGANGAN INDONESIA DAN AMERIKA SERIKAT [US\$ MILIAR]

	JAN '25	2024	2023	2022
Ekspor	2,33	26,31	23,25	28,18
Migas	0	0,0001	0,02	0
Non Migas	2,33	26,31	23,23	28,18
Impor	0,99	11,97	11,28	11,61
Migas	0,23	2,5	2,05	2,3
Non Migas	0,76	9,47	9,22	9,32
Neraca Perdagangan	1,34	14,34	11,97	16,57

Sumber: Kontan, 9 April 2025

seperti terjadinya retaliasi tarif dari mitra dagang utama AS, khususnya Tiongkok, terganggunya rantai pasok global, serta penurunan volume perdagangan internasional.

Di sisi lain, Indonesia justru mencatatkan surplus perdagangan yang cukup besar terhadap Amerika Serikat. Berdasarkan data dari Kementerian Keuangan per Maret 2025, nilai impor AS dari Indonesia mencapai US\$ 29,5 miliar, sementara ekspor AS ke Indonesia tercatat sebesar US\$ 10,2 miliar. Hal ini menghasilkan surplus sebesar US\$ 19,3 miliar bagi Indonesia. Dengan surplus yang signifikan ini, Indonesia memiliki posisi tawar yang cukup kuat, bahkan menerapkan tarif balasan terhadap produk AS dengan besaran mencapai 64%.

PELUANG INDONESIA DI TENGAH GELOMBANG PERANG TARIF

“Trump Tarif 2.0”, gelombang baru perang tarif terhadap Tiongkok dan negara-negara mitra dagang lainnya, diprediksi akan mengguncang stabilitas perdagangan global. Meski terdengar seperti ancaman, jika kita berpikir secara positif, sesungguhnya ini adalah momen strategis bagi Indonesia untuk mengambil posisi yang lebih menguntungkan di peta perdagangan dunia.

1. Trade Diversion: Peluang dan Tantangan

Salah satu dampak langsung dari perang tarif adalah trade diversion pergeseran aliran perdagangan dari satu negara ke negara lain akibat hambatan tarif. Ketika produk Tiongkok dibebani tarif tinggi oleh AS, perusahaan-perusahaan global akan mencari alternatif pemasok atau lokasi produksi baru. Di sinilah Indonesia memiliki peluang besar untuk mengambil alih sebagian pasar yang sebelumnya didominasi oleh Tiongkok.

Namun, peluang ini juga datang dengan tantangan. Infrastruktur logistik, birokrasi, dan iklim investasi Indonesia harus segera dibenahi agar mampu

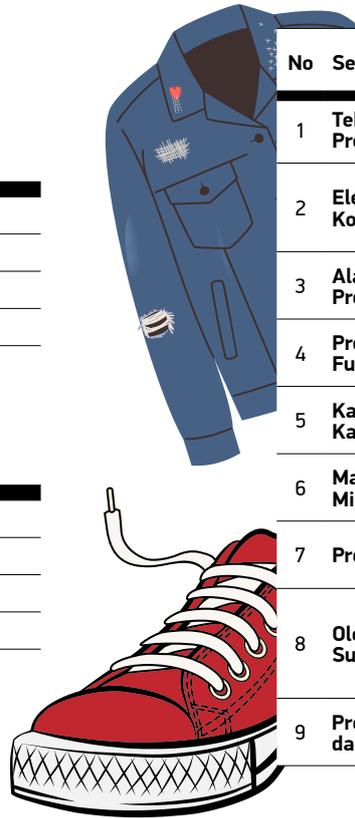
TRADE DIVERSION: PELUANG DAN TANTANGAN

Peluang take over porsi ekspor dari:

1. Vietnam (tarif: 46%)
2. Bangladesh (37%)
3. Thailand (36%)
4. China (34%)

Ancaman daya saing ekspor dari:

1. Filipina (tarif: 17%)
2. Malaysia (24%)
3. Korea Selatan (25%)
4. India (26%)



No	Sektor	Komoditas	Nagara (Peluang)	Negara (Ancaman)
1	Tekstil dan Produk Garmen	Pakaian jadi, kaus, sepatu olahraga	Vietnam, Bangladesh, China	India
2	Elektronik dan Komponen	Semikonduktor, peralatan listrik, suku cadang elektronik	China, Vietnam	Korsel
3	Alas Kaki dan Produk Kulit	Sepatu kulit, sandal, sepatu olahraga	Vietnam, China	India
4	Produk Kayu dan Furnitur	Mebel kayu, produk rotan, panel kayu	China, Vietnam	Malaysia
5	Karet dan Produk Karet	Ban kendaraan, sarung tangan karet	Thailand, Vietnam	Malaysia
6	Makanan dan Minuman Olahan	Produk ikan olahan, mi instan, kopi instan	Thailand, Vietnam	Filipina
7	Produk Perikanan	Udang, tuna, kepiting olahan	Vietnam, Thailand	India
8	Olomotif dan Suku Cadang	Komponen mesin, transmisi, sistem kelistrikan, kaca mobil, dan ban kendaraan	India (26%)	Jepang
9	Produk Logam dan Baja	Baja, aluminium, nikel	AS, India, Vietnam, Uni Eropa	China

Sumber: Sarasehan bersama Presiden RI, 8 April 2025

bersaing secara efektif. Jika tidak, peluang trade diversion bisa dengan mudah direbut oleh negara tetangga.

2. Indonesia Punya Peluang Lebih Besar Dibanding Vietnam

Selama ini Vietnam sering dipuji sebagai destinasi utama relokasi industri akibat perang dagang AS-Tiongkok. Namun dalam gelombang baru ini, Indonesia memiliki sejumlah keunggulan yang tak kalah kuat, bahkan dalam beberapa aspek, lebih kompetitif dibanding Vietnam:

- Pasar domestik yang besar memberikan daya tarik tambahan bagi investor asing.
- Ketersediaan tenaga kerja dalam jumlah besar dengan biaya yang relatif kompetitif.
- Peluang hilirisasi sumber daya alam yang lebih luas, yang mendukung pembangunan industri berbasis nilai tambah.

- Posisi geografis strategis di jalur perdagangan regional maupun global.

Jika dikelola dengan baik, Indonesia bisa melampaui Vietnam sebagai pusat manufaktur dan perdagangan di kawasan.

APA SAJA YANG MENYEBABKAN INDONESIA PUNYA PELUANG DI TENGAH ANCAMAN PERANG TARIF INI?

Indonesia punya beberapa keunggulan yang membuatnya memiliki peluang besar di tengah ancaman perang tarif antara negara-negara besar seperti AS dan Tiongkok, di antaranya:

1. Ketergantungan yang Rendah terhadap Pasar AS

Ekspor Indonesia ke AS hanya setara 2,2% dari PDB, jauh lebih kecil

dibandingkan negara seperti Vietnam yang mencapai 33% dari PDB. Artinya, jika terjadi penurunan permintaan dari AS akibat perang tarif, dampaknya terhadap ekonomi Indonesia tidak akan sebesar negara lain.

2. Fleksibilitas dalam Menyesuaikan Neraca Dagang

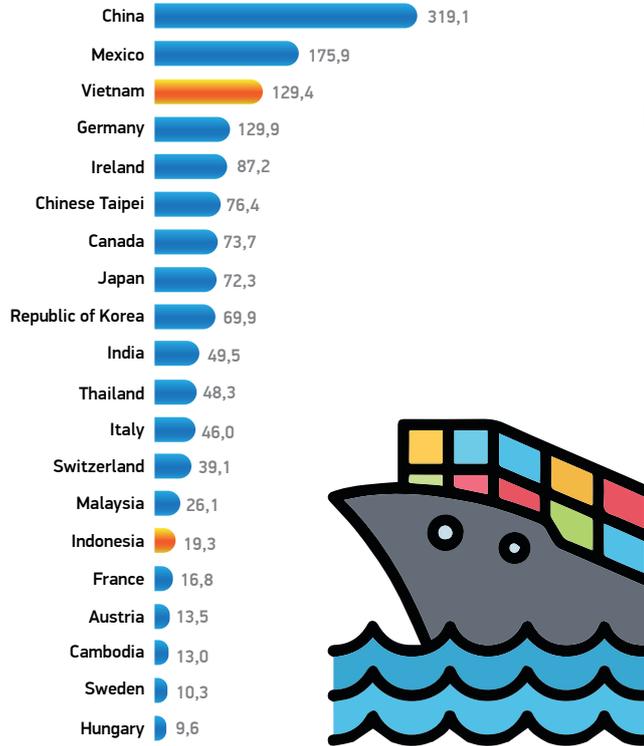
Indonesia punya ruang untuk meningkatkan impor dari AS, misalnya untuk komoditas seperti minyak, gas, kedelai, gandum, dan alat pertahanan. Ini membuat Indonesia bisa menyeimbangkan neraca perdagangan dengan AS dan menghindari tekanan tarif tambahan.

3. Surplus Perdagangan yang Moderat

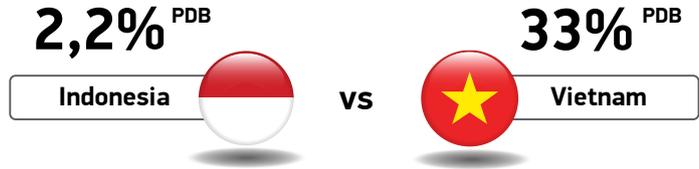
Indonesia mencatat surplus perdagangan dengan AS, tapi dalam skala yang tidak terlalu besar, sehingga tidak terlalu

INDONESIA PUNYA PELUANG LEBIH BESAR DIBANDING VIETNAM

Top 20 Negara Asal Defisit Perdagangan AS 2024
(US\$ Miliar)



Share Ekspor ke AS Terhadap PDB



- Ketergantungan Vietnam terhadap pasar AS sangat tinggi, sehingga penyeimbangan surplusnya akan berisiko besar secara ekonomi dan politik.
- Indonesia justru memiliki fleksibilitas lebih besar, untuk menyeimbangkan Neraca Perdagangan dengan AS melalui peningkatan impor barang dari AS, seperti Minyak, Gas, Soybean, Gandum, dan Alutsista.
- Dengan surplus yang kecil dan ketergantungan yang rendah, Indonesia berada dalam posisi yang lebih aman dan strategis untuk memperkuat kerja sama dagang dengan AS.

Catatan: Neraca Perdagangan RI Tahun 2024

- **Top-3 Ekspor dari RI:** (1) RRT: USD60,2 Bn; (2) AS: USD28,6 Bn; (3) India: USD20,3 Bn
- **Top-3 Defisit RI (NonMigas):** (1) RRT: USD11,4 Bn; (2) Australia: USD5,2 Bn; (3) Thailand: USD3,8 Bn
- **Top-3 Surplus RI (Non Migas):** (1) AS: USD16,8 Bn; (2) India: USD8,8 Bn; (3) Filipina: USD8,8 Bn

[TABEL 3] **PELUANG INDONESIA DI TENGAH GELOMBANG PERANG TARIF**

1. Di tengah ketidakpastian global, terutama dampak dari kebijakan Tarif AS, fundamental ekonomi makro Indonesia cukup kuat, perekonomian tetap tumbuh positif, ditopang semua indikator utama.
2. Peringkat daya saing membaik dan konsisten meningkat, penilaian rating Layak Investasi [Positif, Stabil].
3. Kinerja Sektor Keuangan bergerak dinamis sejalan dengan perkembangan global
4. Ketidakpastian global semakin meningkat, Pasca Penetapan Tarif AS [Gejolak Pasar Keuangan Global, terganggunya perdagangan dunia, potensi perlambatan ekonomi Kawasan dan dunia].
5. Sejalan tren perlambatan global, Harga Komoditas Strategis Dunia mengalami penurunan.
6. Neraca Perdagangan ASEAN mengalami Surplus terbesar kedua [setelah RRT] sebesar USD239,9 Miliar, posisi ASEAN sangat penting, perlu kebersamaan ASEAN

dalam merespons kebijakan Tarif AS.

7. Pemerintah RI tidak merencanakan Retaliasi, memilih jalur negosiasi dan mendorong skema TJFA, melihat AS sebagai Mitra Strategis untuk penguatan perdagangan dunia yang lebih adil.
8. Peluang di Tengah Perang Tarif Dagang: Beberapa produk ekspor unggulan RI [Apparels dan Footwear], berpotensi besar melakukan penetrasi pasar, karena memiliki tarif lebih rendah [32%] dari negara *peers*: Vietnam [46%], Bangladesh [37%], Kamboja [49%].
9. Pemerintah RI memandang sebagai Peluang dan memanfaatkan untuk melakukan reformasi struktural melalui Paket DEREGULASI:
 - (1) Penyederhanaan Perizinan Berusaha
 - (2) Reformasi Perizinan Berusaha
 - (3) Reformasi NTM [TKDN, Sertifikasi Halal, Pembatasan Kuota dll]
 - (4) Harmonisasi / Penurunan Tarif, PPh, PPN, dan pajak Impor

menonjol sebagai “target” dalam perang tarif, seperti Tiongkok atau Vietnam.

4. Diversifikasi Mitra Dagang

Indonesia tidak hanya bergantung pada AS, tapi juga memiliki mitra dagang utama lainnya seperti Tiongkok dan India. Ini membuat Indonesia lebih tahan terhadap guncangan dari satu negara saja.

5. Posisi Geopolitik dan Strategis

Di tengah ketegangan geopolitik, Indonesia dapat memainkan peran sebagai mitra yang netral dan strategis, sekaligus memperkuat kerja sama ekonomi tanpa dianggap “berpihak” secara ekstrem.

Peluang Indonesia di Tengah Gelombang Perang Tarif pada acara Sarasehan ekonomi 8 April 2025, bisa dilihat dalam tabel 3.

Sumber: Sarasehan bersama Presiden RI, 8 April 2025

PENUTUP

Dalam setiap tantangan, selalu terselip peluang. Ungkapan ini mengingatkan kita bahwa di tengah tekanan global sekalipun, akan selalu ada celah untuk bangkit dan melangkah lebih maju. Sejarah pun telah membuktikan bahwa bangsa yang tangguh adalah bangsa yang mampu mengubah krisis menjadi momentum perbaikan dan pertumbuhan.

Langkah cepat yang diambil oleh Presiden Prabowo dan jajaran kabinetnya dalam merespons dinamika global, khususnya terkait perang tarif AS, menunjukkan kesiapan dan keseriusan Pemerintah dalam menjaga stabilitas nasional. Ditambah dengan fundamental ekonomi Indonesia yang cukup kuat, keyakinan akan ketahanan ekonomi kita, patut terus dijaga dan diperkuat.

Meski gejolak sesaat sempat mengguncang pasar keuangan dan menekan nilai tukar Rupiah, hal itu wajar terjadi sebagai bentuk penyesuaian awal terhadap “Trump Tarif 2.0”. Namun demikian, dengan sinergi yang baik antara kebijakan strategis dan respons cepat yang dilakukan Pemerintah, potensi pemulihan dan pertumbuhan ke depan sangat terbuka lebar.

Melihat arah kebijakan dan fondasi yang terus diperkuat, kita memiliki optimisme bahwa Indonesia mampu melewati tantangan ini dengan baik. Bahkan lebih dari itu, jika momentum ini dikelola dengan tepat, Indonesia justru bisa melangkah lebih pasti menuju visi besar Indonesia Emas 2045, sebuah masa depan yang mandiri, maju, dan berdaya

saing global.

Berita terakhir presiden AS pada tanggal 9 April 2025 menunda pelaksanaan tarif terhadap puluhan negara selama 90 hari, kecuali China yang malah dinaikkan tarifnya menjadi 125% dari sebelumnya 104% mengingat China membalas mengenakan kenaikan tarif sebesar 84% terhadap AS. Keputusan Trump dilatar belakangi oleh gejolak pasar yang sangat dramatis, volatilitas sangat tajam sejak masa-masa awal pandemi Covid-19.

Semoga ini menjadi langkah awal yang baik bagi perekonomian global, semoga juga AS dan China bisa menemukan jalan keluar dari perang tarif ini yang terus terang sangat meresahkan dan membingungkan bagi perekonomian global, semoga...

Selamat Hari Raya

Idul Fitri

1 Syawal 1446 H

Mohon Maaf Lahir & Batin



DPBCA

CIRCUIT BREAKER 18 MARET 2025: GEJOLAK PASAR SAHAM INDONESIA DI TENGAH ISU GLOBAL DAN DOMESTIK

Oleh: **Budi Sutrisno**
Direktur Utama Dana Pensiun BCA

LATAR BELAKANG

Pasar Ekuitas sempat dikejutkan dengan pembekuan sementara perdagangan (trading halt) di PT Bursa Efek Indonesia, dan hal ini telah dikonfirmasi oleh pihak BEI tanggal 18 Maret 2025 pada jam 11:19:31 waktu Jakarta Automated Trading System (JATS), yang dipicu penurunan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mencapai 5%. Setelah perdagangan dibuka kembali, IHSG ditutup di level 6.076, mencatatkan penurunan sebesar 6,11% dibandingkan hari sebelumnya.

Sebetulnya apa yang menjadi sebab BEI terkena Circuit Breaker? Beberapa faktor yang memicu berasal dari isu domestik dan global. Dari dalam negeri antara lain muncul rumor mengenai pengunduran diri Menteri Keuangan Sri Mulyani, revisi Undang-Undang TNI, serta tekanan margin call yang mempengaruhi investor retail. Sementara dari sisi global masih di seputar kebijakan perdagangan Presiden AS Donald Trump yang masih mempertahankan Trade War antara AS dengan trading partner terbesarnya Kanada, Meksiko dan Cina turut memberikan dampak negatif pada pasar Indonesia.

KONDISI IHSG DAN PERGERAKAN RUPIAH

Bila kita amati, IHSG telah mengalami penurunan sebesar 21% dari puncaknya (all time high) pada 19 September 2024 di level 7.905, sedangkan indeks LQ 45 turun hingga 28%.

Secara historis, pasar saham Indonesia sangat sensitif terhadap pergerakan nilai tukar dolar AS, sehingga Dollar Index (DXY) menjadi salah satu faktor utama yang mempengaruhi IHSG. Bagaimana kondisi DXY pada saat ini?

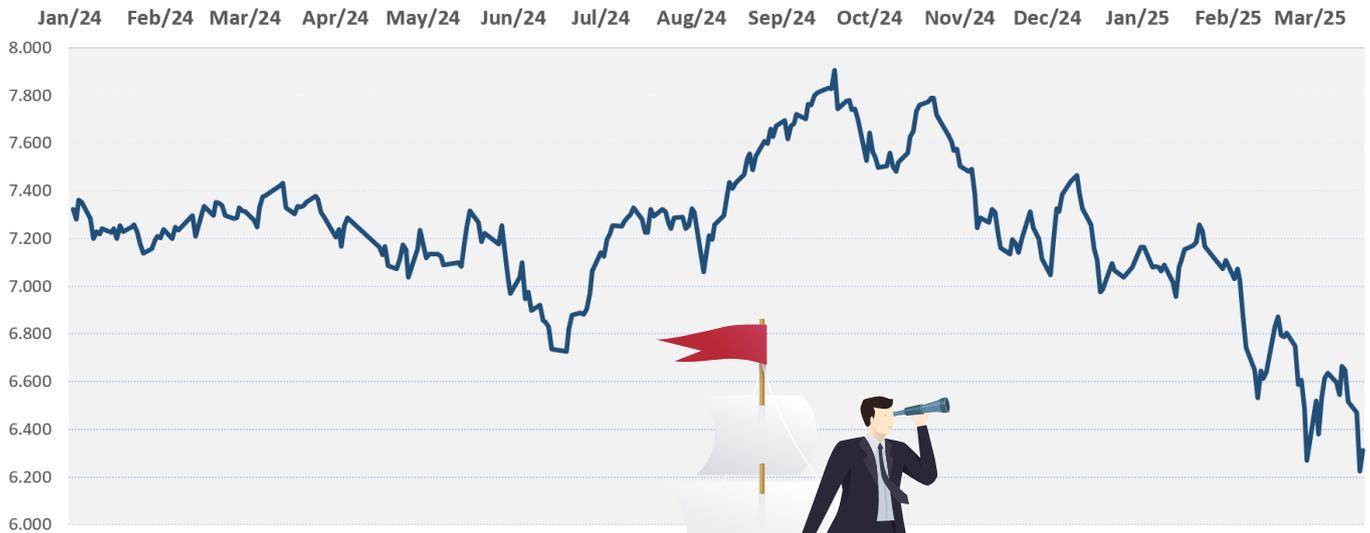
Saat ini, DXY sedang mengalami penurunan, dari level tertinggi 110 pada Januari 2025 menjadi 104 pada pertengahan Maret 2025, seiring dengan meningkatnya kekhawatiran resesi di AS dan kemungkinan penurunan suku bunga The Fed sebanyak 3 (tiga) kali hingga akhir tahun 2025. Sayangnya, pelemahan dolar ini tidak diikuti oleh penguatan Rupiah, sebaliknya, Rupiah justru melemah sebesar 1%.

Kalau kita amati pergerakan Rupiah yang melemah sendiri dibanding dengan mata uang USD mengindikasikan bahwa pergerakan Rupiah sangat dipengaruhi oleh faktor domestik dibandingkan faktor global.

Ada beberapa isu yang beredar di masyarakat yang mempengaruhi pasar saham kita antara lain:

1. **Tidak tercapainya penerimaan pajak.** Pada bulan Januari dan Februari 2025, penerimaan pajak hanya mencapai sebesar Rp 187,8 triliun atau turun 30,19% dari realisasi periode yang sama tahun 2024 sebesar Rp 269,02 triliun. Padahal target penerimaan pajak yang dipatok pemerintah tahun ini cukup tinggi, yaitu Rp 2.189,3 triliun, seperti disampaikan dalam penjelasan pemerintah penyebab dari tidak tercapainya penerimaan pajak bulan Januari dan Februari ini adalah:
 - Penurunan harga komoditas, terjadi pada komoditas utama yaitu batu bara (-11,8%), minyak mentah Brent (-5,2%), dan nikel (-5,9%)
 - Dampak penerapan TER PPh 21, berlakunya mekanisme penghitungan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 sejak Januari 2024 berdampak pada timbulnya lebih bayar PPh 21 tersebut yang kemudian baru diperhitungkan

PERKEMBANGAN IHSG



[Sumber: Trimegah AM]

pada masa pajak Desember 2024.

- Relaksasi Sanksi Keterlambatan pembayaran PPN, Pemerintah juga menyebut penurunan pajak terjadi karena pemberian relaksasi atas pembayaran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dalam negeri yang diperpanjang hingga 10 Maret 2025.

2. Defisit Fiskal Februari 2025.

Kekhawatiran meningkat terhadap pengeluaran pemerintah dan stabilitas ekonomi setelah kita menunjukkan data defisit fiskal mencapai 0,1% dari PDB dalam dua bulan pertama 2025 (defisit pertama sejak 2021). Penyebab utama adalah penurunan tajam pada pendapatan Pemerintah yang turun 20,9% YoY, dengan pendapatan pajak anjlok 25% YoY, (seperti penjelasan di atas), sementara belanja pemerintah juga menurun 7% YoY, diduga karena upaya efisiensi. Penurunan belanja pemerintah menimbulkan kekhawatiran terhadap dampaknya pada daya beli dan aktivitas ekonomi.

3. Isu terkait Danantara, sampai saat ini masih menjadi perbincangan umum terkait dari sisi eksekusinya, pengelolaan BUMN serta kebijakan

investasi Danantara. Isu ini yang mempengaruhi emiten BUMN yang ada di bursa sehingga terjadi harga sahamnya terkoreksi.

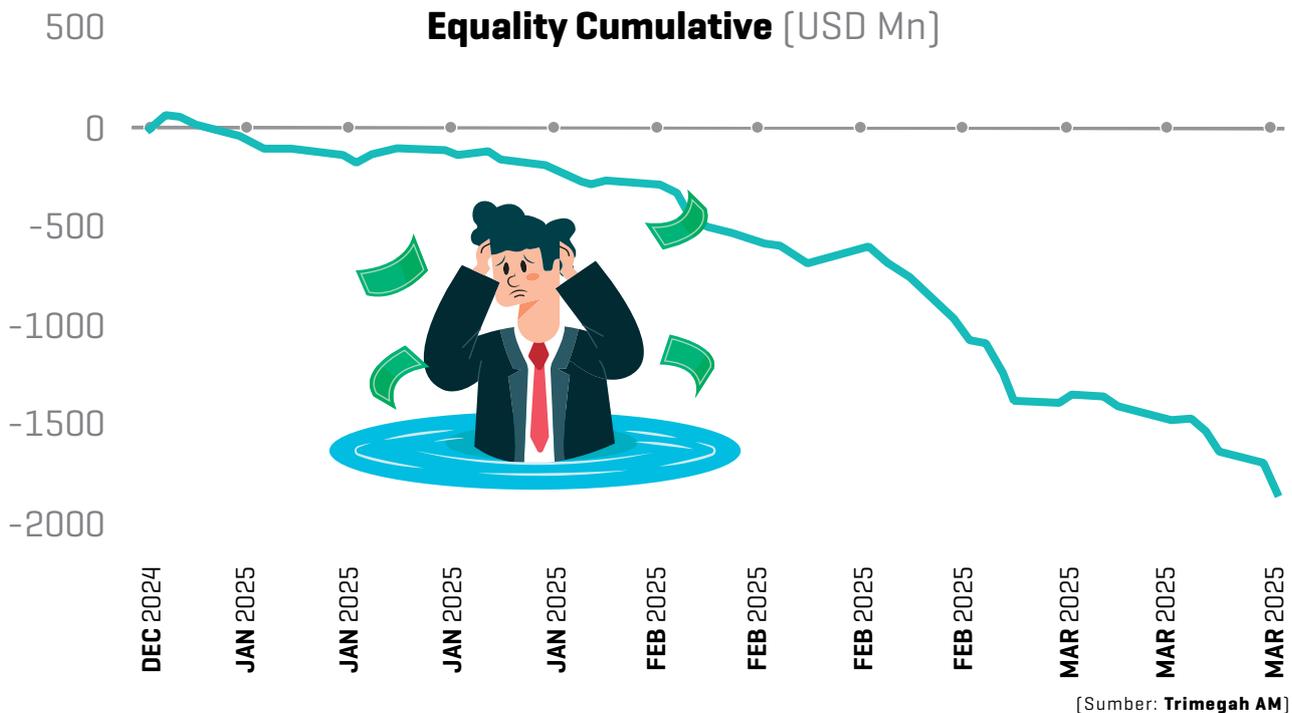
Dari sisi global, pergerakan pasar saham Indonesia juga dipengaruhi oleh adanya arus keluar modal asing. Pada perdagangan bursa saham 18 Maret 2025 tercatat arus keluar modal asing sebesar USD 156 juta dalam sehari dan lebih dari USD 1,6 milyar sejak awal tahun (Year to Date/YTD). Investor asing telah melakukan aksi jual besar-besaran di pasar saham Indonesia dalam beberapa bulan terakhir. Hal ini mencerminkan sentimen negatif investor asing terhadap prospek pasar Indonesia, yang disebabkan beberapa faktor, termasuk ketidakpastian ekonomi global, pelemahan nilai tukar rupiah, kebijakan

moneter yang lebih ketat, serta berbagai faktor domestik lainnya.

BERBAGAI UPAYA DAN TANGGAPAN PEMERINTAH MENYIKAPI SITUASI SAAT INI

Pemerintah sangat menaruh perhatian atas situasi yang terjadi saat ini dan segera mengambil langkah-langkah startegis:

- Jajaran Kementerian Keuangan langsung memberikan press release pada 18 Maret 2025 yang disampaikan langsung oleh Menkeu Sri Mulyani Indrawati, dikatakan bahwa APBN tumbuh 6,6% pada Maret 2025, telah terjadi turn around, lebih baik dari pada data yang disampaikan Kemenkeu pada pekan sebelumnya, posisi pendapatan



negara itu menunjukkan tren positif sejak 1-17 Maret 2025, sebelumnya memang diakui penerimaan bruto sempat minus 3,8% pada Februari 2025.

- Selain itu Pemerintah memastikan bahwa Surat Utang Negara (SUN) masih menarik bagi investor. Dikatakan juga bahwa pemerintah akan menjaga defisit APBN diposisi 2,53% terhadap PDB (Product Domestic Bruto).
- Dari BEI sendiri melalui Ketuanya, Iman Rachman menegaskan bahwa penurunan IHSG akibat faktor global dan dalam negeri, namun ditegaskan bahwa Perusahaan yang tercatat di bursa secara fundamental memiliki kinerja yang solid, terbukti dari laporan keuangan tahun sebelumnya sebagian besar menunjukkan pemulihan dibanding dengan tahun 2023.
- Pada tanggal 19 Maret 2025 di dalam Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia memutuskan mempertahankan suku bunga acuan atau BI Rate yaitu tetap sebesar

5,75%. Seiring Keputusan ini, Bank Indonesia juga mempertahankan Deposit Facility tetap sebesar 5,00% dan suku bunga Lending Facility tetap sebesar 6,5%. Keputusan ini konsisten dengan upaya menjaga inflasi 2025 dan 2026 yang diperkirakan terkendali dalam sasaran 2,5%+1% serta mendukung pertumbuhan ekonomi yang diproyeksikan sebesar 4,75%-5,5%.

PENUTUP

Berdasarkan data yang tersedia, dapat disimpulkan gejolak yang terjadi di pasar modal kita dipengaruhi oleh faktor global dan faktor domestik, jika harus di nilai dengan angka diperkirakan faktor global adalah 30%, sedang faktor domestik sebesar 70%. Kondisi berpotensi membantu nilai tukar Rupiah jika permasalahan domestik dapat teratasi dan faktor global turun di angka 20%.

Pemerintah sendiri sedang berusaha keras memperbaiki situasi perekonomian nasional dengan mengeluarkan beberapa Keputusan antara lain: Kebijakan Devisa Hasil Ekspor (DHE) berpotensi

membantu menstabilkan nilai tukar Rupiah, serta Keputusan Bank Indonesia untuk mempertahankan suku bunga acuan tetap di level 5,75% dalam upaya menahan agar nilai rupiah tetap stabil dan menarik investor tetap menarik untuk membeli SUN.

Dalam kondisi pasar yang volatil seperti saat ini, langkah-langkah kongkret yang kita harapkan dari Pemerintah diikuti dari market update Trimegah AM, tanggal 18 Maret 2025 adalah sebagai berikut:

- Publikasi neraca pendapatan negara bulan terakhir yang sudah final menunjukkan posisi yang “rebound”. Ini dapat memberi transparansi ke investor bahwa penurunan yang ditunjukkan oleh angka pada bulan Februari 2025 sebagian besar dikarenakan oleh masalah teknis Coretax, bukan karena real ekonomi kita yang collapse.
- Koordinasi yang kuat antara Pemerintah, Bank Sentral dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) guna mendukung kredibilitas pasar modal dan menjaga stabilitas ekonomi. □



Oleh : Praska Putranyo
Chief Executive Officer (CEO) - EDVISOR.ID

IMPLEMENTASI ASSET-LIABILITY MANAGEMENT PADA INVESTASI DANA PENSIUN

Dana Pensiun memiliki karakteristik investasi yang unik karena harus memastikan ketersediaan dana untuk memenuhi kewajiban pembayaran manfaat bagi peserta dalam jangka panjang. Berbeda dengan investor institusi lainnya, Dana Pensiun, khususnya Dana Pensiun yang bersifat Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP) memiliki kewajiban yang sudah ditetapkan dan bersifat jangka panjang sehingga membutuhkan strategi investasi yang mampu menyeimbangkan antara imbal hasil (return) yang optimal dan risiko yang terukur. Salah satu strategi yang banyak digunakan dalam mengelola investasi Dana Pensiun, yakni pendekatan Asset-Liability Management (ALM).

Liability Driven Investment (LDI) sederhana merupakan pendekatan investasi yang berfokus pada pencocokan (matching) antara portofolio aset investasi dengan kewajiban, sehingga memastikan keberlanjutan pembayaran manfaat di masa depan. Adapun portofolio aset investasi dapat berupa di antaranya Deposito, Surat Berharga Negara (SBN), Korporasi, Saham, Reksa Dana, bahkan sektor riil, seperti Penyertaan Langsung maupun Tanah dan/atau Bangunan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 27 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Usaha Dana Pensiun.

Strategi ini menekankan pentingnya mengelola risiko yang terkait perbedaan kelompok durasi antara portofolio aset investasi dengan kewajiban yang harus dipenuhi. Dalam praktiknya, LDI sering kali digunakan sebagai dasar

dalam penerapan ALM yang bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara pengelolaan aset dan kewajiban dalam jangka panjang.

Penerapan ALM sangat penting dalam pengelolaan investasi Dana Pensiun karena membantu mengurangi risiko ketidaksesuaian (mismatch) di mana arus kas masuk dari aset investasi lebih kecil dari arus kas keluar untuk pembayaran manfaat maupun mismatch karena risiko perubahan tingkat bunga yang berpotensi menyebabkan nilai pasar wajar aset investasi di bawah nilai sekarang dari kewajiban. Selain itu, ALM memungkinkan Dana Pensiun untuk mengalokasikan portofolio secara lebih efisien dengan mengkombinasikan antara pengelolaan risiko dan optimalisasi hasil investasi.

Namun, dalam implementasinya ALM menghadapi berbagai tantangan yang dapat mempengaruhi kemampuan solvabilitas Dana Pensiun, di antaranya adalah risiko suku bunga, risiko pasar, dan risiko kredit di mana:

1 Risiko Suku Bunga. Perubahan suku bunga dapat mempengaruhi nilai aset dan kewajiban Dana Pensiun. Risiko mismatch terjadi jika terjadi kenaikan suku bunga pasar yang signifikan karena nilai pasar wajar dari aset investasi surat utang, seperti SBN dan obligasi yang bertenor panjang berpotensi mengalami penurunan lebih besar ketimbang nilai sekarang kewajiban Dana Pensiun jika nilai rata-rata durasinya lebih pendek dibanding portofolio surat utang.

2 Risiko Pasar. Volatilitas nilai pasar wajar aset investasi di Pasar Modal, baik karena faktor fundamental emiten penerbitnya (specific risk) maupun faktor ekonomi (market risk), yang dapat mempengaruhi nilai pasar wajar portofolio investasi Dana Pensiun. Risiko pasar biasanya meningkat di tengah kondisi ketidakpastian ekonomi global maupun domestik.

3 Risiko Kredit. Risiko gagal bayar (default) dari penerbit surat utang dapat mengganggu proyeksi likuiditas dan solvabilitas Dana Pensiun. Jika kondisi emiten penerbit surat utang, khususnya Obligasi Korporasi, Sukuk, maupun Medium Term Notes (MTN) memburuk, maka dapat meningkatkan potensi risiko kredit bagi Dana Pensiun sekaligus menimbulkan tantangan dalam pengelolaan ALM.

Salah satu cara menjaga kualitas pengelolaan portofolio investasi Dana Pensiun berbasis konsep ALM, yakni menerapkan konsep Duration Matching di mana pengelola investasi mengatur komposisi investasinya melalui optimalisasi portofolio, yaitu kombinasi return dan risiko yang ideal dan berpegang pada prinsip di mana rasio antara durasi portofolio aset investasi harus sama dengan durasi kewajiban Dana Pensiun. Langkah ini dilakukan untuk meminimalkan risiko jika terjadi kenaikan suku bunga pasar yang signifikan dan berpotensi menggerus nilai wajar aset investasi, khususnya yang berkaitan dengan instrumen surat utang,

seperti SBN dan obligasi korporasi yang dicatat dalam kelompok Available For Sale (AFS).

Sementara pada instrumen investasi Pasar Modal lainnya, seperti Saham dan Reksa Dana juga berpotensi mengalami penurunan nilai pasar wajar karena kenaikan tingkat diskonto yang menyebabkan Saham maupun aset-aset investasi yang menjadi underlying assets produk Reksa Dana mengalami penurunan valuasi harga wajarnya.

Karena itu, pada umumnya strategi yang dilakukan adalah jika proyeksi suku bunga pasar akan naik, maka pengelola investasi cenderung menurunkan durasi portofolionya, khususnya pada aset-aset investasi yang berbasis surat utang dengan pencatatan AFS serta memilih saham-saham yang cenderung defensif dan dividend players untuk menjaga Return On Investment (ROI) Dana Pensiun agar tidak tergerus. Sebaliknya, jika proyeksi suku bunga pasar akan turun, maka pengelola investasi cenderung menaikkan durasi portofolionya dan menambah saham-saham dengan kategori growth stocks untuk mengejar pertumbuhan tinggi yang berujung pada peningkatan ROI.

Namun, konsekuensi atas pelaksanaan strategi Duration Matching ini berupa keharusan pengelola investasi melakukan rebalancing (relokasi investasi) yang periodik, baik kuartalan maupun semesteran, untuk terus menjaga nilai durasi portofolio aset investasi tetap terjaga maksimal sama dengan durasi kewajiban. Selain itu, pengelola investasi juga wajib mencermati variabel-variabel makroekonomi yang mempengaruhi pergerakan suku bunga pasar agar bisa mengantisipasi risiko penurunan nilai pasar aset investasi.

Yang perlu diperhatikan adalah jika ALM diterapkan dengan menggunakan pendekatan nilai total, yakni durasi dari total portofolio investasi dan nilai

kewajiban manfaat, bukan berdasarkan durasi dari per klaster jangka waktu jatuh tempo antara aset investasi dan kewajiban. Jadi, pengelola investasi dapat fokus mengatur komposisi portofolionya dengan tetap menjaga rasio Duration Matching sebesar 1:1 antara aset dengan kewajiban. Selain itu, penjagaan zero mismatch risk atau selisih positif antara nilai aset investasi dengan kewajiban difokuskan pada klaster jangka waktu hingga maksimal 3 (tiga) tahun.

Dari segi pengelolaan risiko, implementasi ALM mewajibkan pengelola investasi untuk terus memperhatikan



perkembangan indikator dari 3 (tiga) sumber risiko yang potensial dan melekat, yakni risiko perubahan suku bunga, risiko pasar, dan risiko kredit. Pada risiko perubahan suku bunga, pemantauan atas perbandingan dari durasi portofolio investasi existing dengan durasi portofolio investsasi acuan (benchmark) bisa menjadi pertimbangan, terlebih lagi jika durasi portofolio benchmark tersebut terus dievaluasi agar menjaga nilai durasi aset maksimal sama dengan durasi kewajiban. Tujuannya adalah untuk membantu Pengurus dan pengelola investasi Dana Pensiun dalam mengantisipasi terjadinya

risiko mismatch jika suku bunga pasar naik signifikan.

Sementara pada risiko pasar, indikator evaluasi dapat berupa pemantauan nilai Value at Risk (VaR) selama periode tertentu dari aset-aset investasi di Pasar Modal yang dicatat pada nilai pasar wajar. Indikator ini mengukur potensi nilai kerugian maksimum dari suatu portofolio investasi, khususnya pada jenis instrumen Saham dan Reksa Dana yang memiliki tingkat volatilitas yang relatif lebih tinggi dibanding surat utang. Jika nilai VaR meningkat, maka pengelola investasi wajib meninjau komposisi serta daftar aset investasi penyusun portofolio. Tujuannya adalah untuk membantu Pengurus dan pengelola investasi Dana Pensiun dalam membantu potensi risiko pasar yang melekat pada portofolio investasi saat ini.

Terakhir, risiko kredit pada instrumen surat utang, khususnya Obligasi Korporasi, dapat diukur dengan pemetaan risiko konsentrasi investasi, baik berbasis kelompok peringkat utang (rating) maupun jenis industri. Sementara pada penempatan investasi di Deposito, pemetaan risiko konsentrasi dapat dilakukan berdasarkan Kelompok Bank berdasarkan Modal Inti (KBMI). Tujuannya adalah untuk membantu Pengurus dan pengelola investasi Dana Pensiun dalam memantau penyebaran aset investasi berdasarkan kelompok industri maupun rating sekaligus menentukan batasan maksimal konsentrasi untuk meminimalkan risiko.

Melalui implementasi ALM, maka dapat membantu pihak Pengurus maupun pengelola investasi Dana Pensiun dalam menyeimbangkan antara pencapaian target ROI dengan strategi meminimalkan risiko mismatch dan pengawasan pada 3 (tiga) risiko utama, yaitu risiko volatilitas nilai pasar, risiko gagal bayar, dan risiko perubahan suku bunga. Selamat berinvestasi!

PENGEMBANGAN SDM DAPEN YANG BENAR DENGAN BENAR, BAGAIMANA CARANYA?



Oleh: **Nugroho Dwi Priyohadi**,
Direktur Dapen Pelindo Purnakarya,
Dosen LB di Universitas Airlangga dan
STIAMAK Barunawati Surabaya



PENGANTAR

Belum lama berselang, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK Kembali mengeluarkan regulasi baru dalam sektor perasuransian, penjaminan, dan dana pensiun (PPDP) dengan menerbitkan Peraturan OJK Nomor 34 Tahun 2024 (POJK 34/2024). Berdasarkan rilis resmi dari OJK, dikatakan bahwa POJK 34/2024 mulai berlaku enam bulan terhitung sejak tanggal diundangkannya pada 23 Desember 2024, atau efektif sejak Mei – Juni 2025 ini.

Ketentuan yang telah disosialisasikan tersebut mengatur tentang pengembangan kualitas sumber daya manusia bagi

perusahaan perasuransian, lembaga penjamin, dana pensiun, serta lembaga khusus bidang PPDP.

Dalam hal ini, Pelaksana Tugas Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan dan Komunikasi OJK M. Ismail Riyadi menjelaskan, sumber daya manusia (SDM) yang memiliki kapasitas dan kompetensi yang tepat serta spesifik sesuai dengan karakteristik penyelenggaraan usaha dari masing-masing industri dapat berperan signifikan dalam mendukung keberlanjutan bisnis di tengah persaingan sektor jasa keuangan. Dikatakan bahwa pengaturan

secara khusus mengenai pengembangan kualitas SDM bidang PPDP melalui POJK 34/2024, diharapkan akan membantu mewujudkan sektor keuangan yang inovatif, efisien, inklusif, dapat dipercaya, kuat, dan stabil, demikian dikatakan oleh OJK.

Lantas bagaimana situasi SDM pada Dana Pensiun existing, serta tantangan ke depan?

CITA CITA SUDAH BENAR

Cita-cita di balik POJK tersebut sudah benar, yakni mengembangkan kualitas SDM sehingga betul-betul organisasi keuangan, khususnya lagi Dapen, akan inovatif, efisien, inklusif, dapat dipercaya, kuat dan stabil. Namun demikian, kita masih bisa diskusi terkait tantangan ke depan.

Misalnya apakah sektor keuangan itu memerlukan situasi yang Bernama “Inovatif”? Salah satu pihak percaya, bahwa inovasi itu diperlukan sebagai terobosan untuk memajukan Perusahaan. Namun bagi Dapen, sebagian ada yang percaya bahwa sejatinya organisasi “tidak membutuhkan inovasi”, kecuali mendasarkan diri kepada kepatuhan, kesesuaian dengan regulasi yang berlaku, dan jelas ini adalah bersifat konservatif.

Dalam konteks ini, memang seakan ada benturan antara “inovasi” dengan “comply terhadap regulasi”.

Merujuk kepada pengalaman beberapa Dapen, ada inovasi-inovasi masa lalu yang ternyata di masa depan, menjadi masalah hukum karena banyak faktor: conflict of interest, problem di proses pengadaan barang dan jasa, SOP (System Operating Procedure) yang tidak dipatuhi atau bahkan malahan tidak ada, prediksi atas margin market yang meleset sejauh-jauhnya, dan sebagainya.

Maka mencetak SDM yang inovatif versus patuh regulasi, seperti saat ini lebih aman bila diarahkan kepada SDM yang patuh kepada regulasi. Ini juga bisa dikatakan inovasi, atau sesuatu yang baru, sebab bisa saja di masa lampau model SDM yang ada lebih menyukai multiple risk, atau gegabah dalam melakukan kebijakan organisasi, khususnya di bidang investasi.

Di masa sekarang, kepatuhan itu lebih unggul ketimbang inovasi yang berisiko.

Jika fokus kepada pengembangan

kompetensi SDM, POJK tersebut layak disambut gembira karena adanya ketegasan regulatory body yang menetapkan angka minimal 3.5% dari Biaya Pegawai untuk dialokasikan kepada biaya Pendidikan pelatihan dan pengembangan SDM lainnya.

Disebutkan dalam Pasal 4 ayat (3), jumlah penyediaan dana pendidikan dan pelatihan wajib disediakan oleh perusahaan perasuransi, lembaga penjamin, dan dana pensiun untuk setiap tahun buku paling sedikit 3,5 persen dari total realisasi beban pegawai, direksi,



CARUT-MARUT SEBUAH ORGANISASI BISA DISEBABKAN ADANYA KEPEMIMPINAN ATAU BAHKAN KEPENGKUTAN, YANG SAMPAI PADA TAHAP INDIKASI NPD (NARCISTIC PERSONALITY DISORDER). CIRINYA SUDAH SANGAT POULER DIBAHAS OLEH BANYAK AHLI PERILAKU, YANG INTINYA ADANYA SENTRALISTIK DAN HEGEMONI KEBENARAN DALAM MENGAMBIL KEPUTUSAN.

dewan komisaris, dan dewan pengawas tahun sebelumnya.

Artinya menjadi acuan yang lebih jelas bagaimana Dapen merencanakan program pengembangan SDM ke depannya. Pengurus tidak perlu mengeluarkan energi berlebih Ketika berdiskusi dengan Dewan Pengawas atau bahkan pendiri, ketika menetapkan anggaran Renbis terkait Pengembangan SDM ini.

PROFILING KOMPETENSI SDM

Jika alokasi biaya sudah benar, lantas bagaimana memprogram pengembangan SDM yang benar?

Jikalau standardisasi pengembangan SDM didasarkan kepemilikan atas sertifikasi kompetensi, maka itu sudah lazim dan memang layak didukung.

Banyak rujukan yang menyatakan bahwa kompetensi SDM tidaklah melulu atas hard competency (ketrampilan teknis organisasional), namun juga soft competency (sikap, perilaku, dan mental).

Dari diskusi-diskusi dengan para pemerhati SDM, disinyalir carut-marut sebuah organisasi bisa disebabkan adanya kepemimpinan atau bahkan kepengikutan, yang sampai pada tahap indikasi NPD (Narcistic personality disorder). Cirinya sudah sangat pouler dibahas oleh banyak ahli perilaku, yang intinya adanya sentralistik dan hegemoni kebenaran dalam mengambil Keputusan.

Risikonya adalah tanggung jawab organisasi tidak bertumbuh dalam konteks team building, namun individual non transformasional.

Dengan demikian, tahap implementasi POJK dimaksud, tidaklah sekedar memenuhi batas minimal alokasi anggaran. Namun juga bagaimana memprogram pengembangan SDM yang benar dengan benar.

Konteks “yang benar” adalah sesuai kebutuhan masa kini maupun masa mendatang, konteks “dengan benar” yakni mendeteksi awal (pra assessment) kebutuhan pengembangan SDM organisasi itu sejatinya fokus kepada hard competency, atau juga soft competency? Profiling kompetensi SDM eksisting dan kebutuhan masa depan, adalah kebutuhan nyata bagi organisasi.

Maka tuntutan bagi Asosiasi atau Perkumpulan yang menyelenggarakan program sertifikasi atau diklat kompetensi, untuk mendesain tidak saja Diklat yang fokus kepada Hard Competency, namun juga Soft Competency.

Diharapkan, dengan demikian, pasca implementasi POJK 34/2024 ini organisasi akan semakin mampu menghadirkan pemimpin dan pengikut yang memenuhi standar kompetensi secara utuh. □

Selamat Hari Raya

عيد الفطر

1 Syawal 1446 H

Mohon Maaf Lahir & Batin





Oleh: Siti Rakhmawati

(Direktur Investasi & Keuangan
Dana Pensiun Telkom)

Head of Advocacy CFA Society Indonesia

IMPLEMENTASI KEUANGAN BERKELANJUTAN DI INDONESIA*]



Semakin hari, kita semakin sering mendengar berita musibah terkait perubahan iklim, baik dalam bentuk bencana alam banjir, kebakaran hutan, kekeringan dan seterusnya. *Negative externalities* yang berdampak sangat mahal pada ekonomi ini sudah seharusnya dapat lebih dimitigasi dengan melakukan upaya internalisasi secara lebih proaktif.

Indonesia telah menunjukkan komitmennya melalui ratifikasi Protokol Kyoto pada tahun 2004 dan Perjanjian Paris yang merupakan kesepakatan global yang monumental untuk menghadapi perubahan iklim pada tahun 2016 lalu. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati juga mempromosikan jargon yang juga merepresentasikan kepentingan emerging market melalui transisi yang tidak saja adil tetapi juga terjangkau (*just & affordable*) sehingga diharapkan akan menghasilkan pertumbuhan yang berkelanjutan, sekaligus meningkatkan lapangan kerja dan mengurangi kesenjangan, yang merupakan aspirasi dari seluruh masyarakat global.

Keluarnya Amerika dari Perjanjian Paris di masa kepemimpinan Presiden Trump menjadi pukulan moral bagi aksi iklim global. Namun tanpa kehadiran Amerika, upaya memerangi perubahan iklim diharapkan terus berlanjut dan semakin masif.

POJK Nomor 51 /POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten dan Perusahaan Publik

Industri Dana Pensiun dan Asuransi selaku pemilik aset investasi merupakan salah satu pemangku kepentingan yang harus mengimplementasikan keuangan berkelanjutan agar dapat memitigasi risiko

dan sekaligus mendapatkan peluang return dari aspek keberlanjutan yang sedang menjadi mega trend ini.

Dalam POJK 51/2017, penerapan keuangan berkelanjutan wajib dilakukan oleh Dana Pensiun yang memiliki aset paling sedikit Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2025, antara lain wajib menyusun, melaksanakan dan mengkomunikasikan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan, serta wajib menyusun Laporan Keberlanjutan.

Saat ini POJK tersebut sedang di-review untuk direvisi sesuai kebutuhan.

Taksonomi Keuangan Berkelanjutan Indonesia /TKBI

Sebagai wujud komitmennya dalam mendukung komitmen Net Zero Emission (NZE), pada bulan Februari 2025 yang lalu OJK telah memperkenalkan TKBI versi 2 yang berfokus pada sektor Construction and Real Estate, Transportation and Storage dan sebagian Agriculture, Forestry and Other Land Use (AFOLU), yaitu sektor kehutanan dan perkebunan kelapa sawit.

Penerbitan ini melanjutkan penerbitan TKBI versi 1 pada Februari 2024 lalu yang berfokus pada sektor energi. Untuk selanjutnya, OJK akan mengembangkan TKBI versi 3 yang mencakup sektor AFOLU lanjutan, Manufacturing, dan Water Supply, Sewerage & Waste Management.

TKBI juga akan ditinjau secara berkala

dalam rangka menjaga kekinian yang sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan kebijakan keuangan berkelanjutan di tingkat nasional dan global.

TKBI merupakan klasifikasi aktivitas ekonomi yang mendukung upaya dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) Indonesia yang mencakup aspek ekonomi, lingkungan hidup, dan sosial. TKBI digunakan sebagai panduan untuk meningkatkan alokasi modal dan pembiayaan berkelanjutan dalam mendukung pencapaian target NZE Indonesia. Tujuan strategis TKBI adalah:

- a. Menyempurnakan standar definisi aktivitas ekonomi agar sejalan dengan TPB yang menyelaraskan aspek ekonomi, lingkungan hidup, dan sosial.
- b. Meminimalkan multitafsir, green-

washing, social washing, dan impact washing dengan kerangka yang berbasis sains.

- c. Meningkatkan alokasi modal dan pembiayaan berkelanjutan dalam mendukung pencapaian target NZE Indonesia.
- d. Menjadi dasar dalam pengembangan kebijakan keberlanjutan antara lain pelaporan keberlanjutan, insentif dan disinsentif, dan pengembangan/ inovasi produk dan/atau jasa Keuangan Berkelanjutan.
- e. Meningkatkan akses, literasi, dan inklusi produk/jasa berkelanjutan melalui perluasan pengguna yang mencakup UMKM dan non-UMKM, yang pada gilirannya mendorong pertumbuhan ekonomi.
- f. Sebagai perwujudan sinergi lintas sektor dengan berbagai pemangku

kepentingan dalam mendukung upaya Keuangan Berkelanjutan di Indonesia termasuk memenuhi target Indonesia di berbagai komitmen global tentang perubahan iklim.

TKBI menggunakan ASEAN Taxonomy for Sustainable Finance (ATSF) sebagai referensi utama, yang disesuaikan dengan kondisi dan kebijakan nasional serta kondisi pelaku ekonomi di Indonesia termasuk pendekatan penilaian bersifat principle-based. Fitur-fitur utama ATSF yang diadopsi dalam TKBI terdiri dari empat tujuan lingkungan:

- Climate Change Mitigation;
- Climate Change Adaptation;
- Protection of Healthy Ecosystems and Biodiversity;
- Resource Resilience and the Transition to a Circular Economy.

Selamat Hari Raya

Idul Fitri

1 Syawal 1446H

Mohon Maaf Lahir & Batin



Fadchi Nizar Amizade
Direktur Kepesertaan & SDM

Siti Rakhmawati
Direktur Investasi & Keuangan

Abdul Hadi
Presiden Direktur

dapen
Telkom



Di samping itu, terdapat tiga kriteria esensial pada ATSF juga diadopsi dalam TKBI, yakni:

- Do No Significant Harm
- Remedial Measures to Transition dan
- Social Aspect

TKBI dapat digunakan oleh setiap pihak yang berkepentingan untuk menilai apakah suatu aktivitas telah memenuhi aspek keberlanjutan, seperti perusahaan, LJK, regulator, investor (termasuk industri Dana Pensiun selaku pemilik aset investasi), profesi pendukung, auditor, verifikator, rating agency, sebagai common language untuk mendefinisikan aktivitas ekonomi yang sejalan dengan TPB serta sebagai mekanisme untuk meningkatkan transparansi untuk menghindari greenwashing, social washing, dan impact washing untuk mencapai tujuan yang sama, yaitu peningkatan capital flow dalam mendukung pemenuhan target NZE Indonesia.

TKBI ini akan mempermudah industri dana pensiun untuk melakukan investasi berbasis keberlanjutan karena sudah distandarkan dan menjadi common language.

Rencana Adopsi Standar Pengungkapan Keberlanjutan

Sejalan dengan hal ini, dalam berita di laman resminya tanggal 6 Februari lalu, Ikatan Akuntan Indonesia yang telah berpengalaman lebih dari 51 tahun dalam merumuskan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, tengah mempersiapkan penerbitan standar pengungkapan keberlanjutan yang diadopsi dari Standar Pelaporan Keuangan Internasional / IFRS S1 (persyaratan umum pengungkapan informasi keuangan terkait keberlanjutan) dan S2 (pengungkapan terkait perubahan iklim) yang diterbitkan oleh International Sustainability Standards Board (ISSB), dimana draf eksposur Pernyataan Standar Pengungkapan

Keberlanjutan telah ditetapkan pada akhir Desember 2024 lalu, sebelum disahkan pada tahun ini.

Penerapan standar ini akan mempermudah Dana Pensiun sebagai investor dalam membaca laporan keberlanjutan, mengakses risiko dan return keberlanjutan, serta melakukan valuasi dan keputusan investasi karena akan meningkatkan konektivitas antara pelaporan keuangan dan pengungkapan keberlanjutan, yang pada akhirnya mendukung tata kelola perusahaan yang lebih baik serta menciptakan lingkungan bisnis yang lebih berkelanjutan.



Bursa karbon Indonesia

Pada tanggal 26 September 2023 telah diresmikan Bursa Karbon Indonesia sebagai bagian dari strategi untuk mencapai target Net Zero Emission (NZE) pada 2060.

Bursa karbon yang dikelola oleh Bursa Efek Indonesia dan diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas ini memungkinkan pelaku usaha, pemerintah, atau individu untuk membeli dan menjual kredit karbon sehingga perusahaan atau proyek yang berhasil mengurangi emisi karbon bisa mendapatkan kredit karbon setelah melalui proses verifikasi oleh KLHK (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan).

Manfaatnya antara lain mendorong pengurangan emisi, sumber pendapatan

baru (dari hasil penjualan kredit karbon), dan meningkatkan daya saing global (yaitu memenuhi standar emisi internasional).

Sumber kredit karbon bisa berasal dari proyek seperti reboisasi, energi terbarukan, atau efisiensi energi.

Sertifikasi CFA Institute Climate Risk, Valuation & Investing

Dengan luasnya isu serta masih beragamnya pemahaman tentang investasi berkelanjutan ini, pada November 2021 lalu CFA Institute, sebuah organisasi profesi investasi yang memiliki misi “untuk memimpin profesi investasi secara global dengan mengedepankan standar etika, pendidikan, dan keunggulan profesional yang tertinggi demi kepentingan masyarakat” ([www://cfainstitute.org](http://www.cfainstitute.org)) telah merilis program sertifikasi ESG (environment, social & governance) Investing, yang bertujuan untuk memperkuat integritas pasar dengan menyediakan benchmark pengetahuan dan skill yang diperlukan para profesional investasi untuk mengintegrasikan faktor ESG dalam proses investasi.

Di tahun 2025 ini, CFA Institute kembali menunjukkan komitmennya dengan merilis program sertifikasi Climate Risk, Valuation, and Investing yang dirancang untuk membantu profesional investasi memahami dampak perubahan iklim terhadap pasar keuangan dan strategi investasi. Dalam program yang dikembangkan melalui kombinasi antara keterampilan praktis, pengetahuan, dan studi kasus dunia nyata ini akan dipelajari risiko iklim dalam keuangan, valuasi aset dan dampak risiko iklim, strategi investasi berkelanjutan, alat dan kerangka analisis, sehingga cocok bagi para profesi analis investasi, manajer portofolio, penasihat keuangan, dan siapa pun yang ingin memahami bagaimana risiko iklim mempengaruhi keputusan investasi, termasuk industri dana pensiun.

**] Versi pendek tulisan ini sedang diajukan untuk diterbitkan di media massa*

MUTASI PROGRAM PPMP KE PPIP, KEUNGGULAN DAN TANTANGANNYA



Oleh: **Nugroho Dwi Priyohadi**
Praktisi Dana Pensiun dan Staf Pengajar LB
di Universitas Airlangga

Saat ini sebagian Dana Pensiun disibukkan dengan ragam diskusi yang mengemukakan apakah ada urgensi memutasikan (switching) program dari PPMP (Program pensiun Manfaat Pasti) ke dalam PPIP (Program Pensiun Iuran Pasti).

Jika ditujukan kepada peserta baru, bagi perusahaan pemberi kerja yang memiliki 2 program sekaligus, yakni PPMP dan PPIP, maka tinggal dibuatkan cut off atau berhenti program dari PPMP ke PPIP, dan peserta lama PPMP dapat meneruskan program dimaksud, dan pada saat bersamaan peserta baru (karyawan baru) diikutkan ke PPIP bukan ke PPMP.

Namun tantangannya adalah, bagaimana jika program PPMP sudah berjalan, apakah bisa dan akan lancar dalam pelaksanaannya? Konteksnya adalah, apakah mudah memindahkan peserta lama yang sudah menerima MP (manfaat pensiun) bulanan selama ini, yang notabene adalah PPMP, langsung di-switching programnya ke PPIP? Apakah hanya kendala penghitungan Aktuarial secara teknis, atau ada tantangan yang lain?

KEUNGGULAN PPIP VERSUS PPMP

POJK No. 35 Tahun 2024 Tentang Perizinan dan Kelembagaan Dana Pensiun memungkinkan bagi perusahaan pemberi kerja untuk menyelenggarakan 2 program pensiun sekaligus, yakni PPMP dan PPIP. Dengan demikian, perusahaan dapat menetapkan program mana yang akan berkesinambungan, program mana pula yang akan di-cut off-kan.



Bagi karyawan baru, pasti belum berpusing terhadap program dimaksud, apakah mau PPMP ataukah PPIP. Sebab masih ada jeda waktu yang relatif lama sampai menunggu usia pensiun, baik yang masih ditetapkan 56 tahun, 60 tahun, atau bahkan 65 tahun.

Namun bagi karyawan lama yang sudah pensiun, alias penerima MP Bulanan, fokus terhadap pilihan program, apabila ada kebijakan mutasi program dari PPMP ke PPIP, hanya ada 3 isu utama, yakni”

1. Apakah MP akan tetap atau malahan naik?

Sebagian besar pensiunan memang fokus kepada penerimaan MP Bulanan. Sebagian dapen ada yang naik secara bertahap dan terencana sesuai peraturan dalam PDP (Peraturan Dana Pensiun) internal, ada pula sebagian besar Dapen yang memang menyelenggarakan PPMP dan tidak

dibunyikan dalam PDP tentang adanya kenaikan periodic atau bertahap. Artinya angka MP Bulanan mengunci pada angka absolut tertentu yang diformulasikan dalam PDP.

Jadi jika ada perpindahan program dari PPMP ke PPIP, sepanjang MP tetap atau bahkan malah naik, seharusnya tidak ada masalah bagi perusahaan atau bagi pensiunan.

Masalahnya adalah tidak semua PDP menjamin adanya persamaan MP Bulanan antara PPMP dan PPIP, bahkan dapat dipastikan memang berbeda.

Bagi perusahaan, PPIP dinilai memiliki keunggulan dalam konteks ini, karena kepastian pembagian dana untuk pembayaran MP mengedepankan pada besaran iuran dan pengembangannya.

Tidak dikenal defisit iuran pada PPIP, yang jika dikenakan pada PPMP, defisit iuran bisa terjadi

ILUSTRASI PERBANDINGAN

Parameter	PPMP	PPIP	KETERANGAN
Manfaat Bulanan	Cenderung fiks atau tetap sesuai formula pada PDP (Peraturan Dana Pensiun)	Bisa berubah sesuai pengembangan Investasi dari Pengelola/ Pengurus Dapen	PPIP untuk akumulasi iuran di bawah 500 juta rupiah diterimakan lumpsum, sedangkan PPMP diterimakan bulanan. Teknis lain kedua program tersebut bisa mirip, karena PPIP yang akumulasi iuran dan pengembangan lebih dari 500 juta maka MP akan diarahkan ke Anuitas/Asuransi dengan MP Bulanan, atau diselenggarakan sendiri oleh Dapen meskipun ini belum lazim.
Pengembangan Investasi	Risiko defisit jika pengembangan minus	Pengembangan langsung dibuku di rekening peserta bulanan	Defisit PPMP berisiko adanya iuran tambahan dari Pendiri, sedangkan PPIP tidak mengenal defisit karena langsung dibuku bulanan ke peserta
Perubahan Data Peserta	Otentikasi menjadi vital karena perubahan peserta ke ahli waris (adanya mutasi janda/duda/anak, atau berakhirnya hak penerimaan MP karena tidak ada ahli waris yang berhak	Diterimakan lumpsum selama ini, sedangkan terkait ahli waris data dipindahkan ke Asuransi/ Anuitas sehingga Dapen sudah selesai tanggung jawabnya	Praktik PPIP eksisting adalah penerimaan MP Sekaligus, sedangkan PPMP penerimaan MP Bulanan. Dalam perkembangannya ada variasi MPS dan MP Bulanan baik untuk PPMP maupun PPIP
Fleksibilitas bagi Pendiri/Mitra Pendiri/Pemberi Kerja	Pemberi kerja berpotensi harus membayarkan Iuran Tambahan jika ada defisit dari selisih pengembangan investasi dengan kewajiban pembayaran MP	Pemberi kerja sudah selesai begitu menunaikan Iuran Bulanan kepada Dapen atas nama masing-masing peserta	Risiko pembayaran Iuran Tambahan bagi Perusahaan untuk PPMP, sedangkan PPIP tidak ada Iuran tambahan akibat defisit
Fleksibilitas Bagi Peserta	Platformnya adalah Manfaat Pasti, maka MP Bulanan angkanya sudah ditetapkan sesuai formula, diterimakan pada saat Usia Pensiun tiba.	Peserta langsung tahu posisi iuran dan pengembangannya tiap bulan pada rekening virtual yang dimiliki masing-masing peserta	Transparansi iuran langsung diketahui PPIP, sedangkan PPMP perlu dihitung ulang berdasarkan perkembangan dasar penghitungan Iuran

manakala hasil pengembangan iuran atau kebijakan investasi tidak sesuai dengan yang diharapkan, dan terjadi kesenjangan antara pembayaran MP Bulanan dengan besaran Iuran plus pengembangan yang ada pada Dapen dimaksud.

PPIP sepanjang pengembangan investasi optimal, maka peserta senang, dan perusahaan juga happy. Kalau toh tidak optimal, maka perusahaan tidak terbebani dengan Iuran Tambahan atas defisit yang terjadi.

Sementara PPMP, setiap ada defisit pengembangan investasi, maka perusahaan wajib membayarkan defisit tersebut sebagai jaminan kepastian pembayaran MP Bulanan yang ditetapkan dalam PDP.

2. Apakah kesinambungan hak sama antara PPMP dan PPIP?

PPMP selama ini berjalan seakan-akan lebih berkesinambungan dibandingkan PPIP. Sedangkan PPIP, dituding hanya mampu membayarkan sejumlah iuran plus pengembangan kepada peserta, tanpa ada mitigasi risiko jika pengembangan investasi tidak optimal.

Padahal, PPMP hanya menjamin besaran tetap pada MP Bulanan, sementara PPIP sangat mungkin mampu membayarkan MP Sekaligus atau MP Bulanan yang lebih tinggi bagi peserta.

Tentang kesinambungan ini, sepanjang diatur dalam PDP maka semua akan lebih jelas masalah hak dan kewajiban yang ditetapkan. Terutama, apakah skema pembayaran MP Bulanan pada PPIP yang menyelenggarakan pembayaran MP Bulanan, didasarkan pada perhitungan 10 tahun (minimal) atau lebih dari itu?

Keunggulan PPIP dengan syarat ketentuan pengembangan investasi optimal, maka peserta akan menerima Manfaat Pensiun yang lebih besar ketimbang PPMP.

Sebab di PPIP manfaat tersebut tergantung kepada iuran dan pengem-

bangun, sementara di PPMP manfaat pensiun dikunci dalam formula tertentu.

3. Apakah ada angin sejuk berhembus adanya program kenaikan MP berkelanjutan?

Pertanyaan ini yang bisa jadi akan mengemuka, dan terus menjadi PR besar bagi perusahaan pemberi kerja. Sebab, sepanjang PDP telah mengatur, maka kenaikan ini dapat diteruskan. Namun jika PDP belum mengatur, maka dapat dipastikan kenaikan MP berkelanjutan masih menjadi tanda tanya.

Dengan demikian, semua tergantung bunyi pasal dalam PDP, yang jika perusahaan pemberi kerja menghendaki, addendum atau bahkan

perubahan pasal, sangat terbuka untuk pelaksanaannya.

Sebagian praktisi Dapen berpendapat, membandingkan antara PPIP dan PPMP tidak bisa apple to apple karena yang satunya adalah “Manfaat Pasti”, sedangkan satunya adalah “Iuran Pasti”. Namun demikian, kita coba bandingkan dengan Karakteristik masing-masing yang bisa jadi punya keunggulan tersendiri, atau kekurangan tersendiri. Sebagai ilustrasi perbandingan, bisa dilihat pada tabel.

Sebagai catatan, sekali lagi ilustrasi di atas hanyalah sebuah bahan diskusi, sebab masih banyak variabel atau parameter yang diperbandingkan, yang bisa saja dapat disetujui para pihak, dapat pula memicu perdebatan tanpa ujung karena

setiap program punya dasar filosofis dan perhitungan yang berbeda.

TANTANGAN KE DEPAN

Tantangan ke depan yang sangat nyata adalah terkait kebijakan besar master plan organisasi Dana Pensiun.

Sebagian Dapen ada yang masuk dalam Master Plan penyehatan, sehingga fokus utama adalah bagaimana menjamin pembayaran MP Bulanan berkelanjutan, khususnya untuk PPMP. Sementara bagi PPIP, optimalisasi pengembangan investasi menjadi tantangan nyata di tengah suasana market yang masih dipenuhi ketidakpastian.

Tetap optimis dan semoga Dapen semakin mampu mensejahterakan pensiunan di negara kita. Semoga. □





Oleh: **Arif Hartanto SH. MH**
(Direktur Eksekutif LSPDP)

LSP DANA PENSIUN PASKA POJK NOMOR 3 TAHUN 2025



Tim kecil menyelesaikan Pedoman Sertifikasi Profesi Dapen

LSPDP merupakan sebuah Lembaga independen yang didirikan oleh ADPI bersama dengan ADPLK pada tahun 2004 sebagai tindak lanjut dari keputusan Dirjen Lembaga Keuangan Departemen Keuangan nomor 2634 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemenuhan Persyaratan Pengurus dan Pengawas DPPK serta Pelaksana Tugas Pengurus DPLK. SK Dirjen ini merupakan tindak lanjut dari Keputusan Menteri Keuangan nomor 513 tahun 2003 tentang Persyaratan Pengurus dan Pengawas DPPK seta Pelaksana Tugas Pengurus DPLK.

Pengurus LSPDP yang dibentuk oleh ADPI bersama dengan ADPLK kemudian menyiapkan materi ujian yang kemudian dikenal dengan istilah Manajemen Umum Dana Pensiun atau MUDP dimana untuk pertama kalinya Pengurus LSPDP juga menjalani ujian MUDP tersebut.

Selain kewajiban untuk lulus MUDP bagi calon Pengurus DPPK dan Pelaksana Tugas Pengurus DPLK, mereka juga diwajibkan untuk melaksanakan “pengetahuan yang berkelanjutan” dengan jalan memperoleh angka kredit setiap tahun melalui keikutsertaan dalam pelatihan atau seminar yang diakreditasi oleh LSPDP.

Bentuk hukum LSPDP waktu itu adalah “perkumpulan berbadan hukum”

dengan akte notaris. Pada tahun 2015, terbit POJK nomor 3 tahun 2015 tentang Investasi Dana Pensiun, dimana ada kewajiban bagi Pengurus DPPK dan Pelaksana Tugas Pengurus DPLK serta jajarannya yang mengurus investasi untuk memperoleh sertifikat manajemen risiko yang diterbitkan oleh lembaga yang memperoleh lisensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi. ADPI bersama dengan ADPLK kemudian bersepakat untuk mendirikan Lembaga seperti yang dimaksud. Persyaratan untuk pendirian lembaga tersebut diantaranya adalah pendirinya harus berbadan hukum. Oleh karenanya, maka ADPI dan ADPLK yang waktu itu masih berstatus asosiasi, mendaftarkan diri ke Kementerian Hukum dan HAM RI, dengan bentuk hukum sebagai “Perkumpulan Berbadan Hukum”, dengan nama Perkumpulan ADPI dan Perkumpulan DPLK.

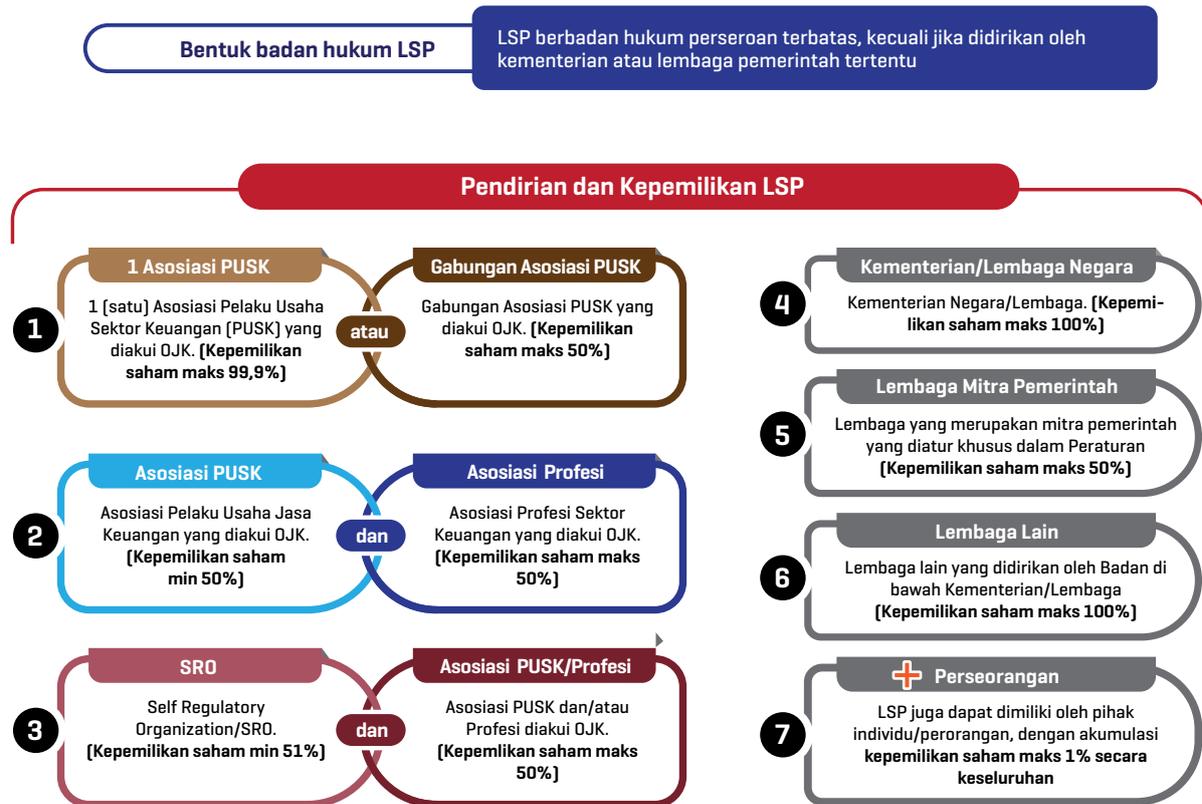
LSPDP juga harus berbadan hukum, merubah namanya menjadi **Lembaga Sertifikasi Profesi Dana Pensiun** dan memperoleh lisensi dari BNSP pada November 2015, setelah beberapa persyaratan dipenuhi diantaranya adalah menyiapkan asesor kompetensi. LSPDP secara in-house menyelenggarakan pelatihan bagi calon Asesor Kompetensi selama 5 hari penuh dan berhasil meluluskan sebanyak 15 orang Aseors, terdiri dari Pengurus ADPI, mantan Pengurus ADPI dan DPLK.

Pelaksanaan sertifikasi manajemen risiko dana pensiun atau MRDP dilaksanakan secara “maraton” meng-

BAB III: KELEMBAGAAN LSP [1]



Pasal 6-7



ingat ketentuan POJK bahwa tahun 2015 jumlah mereka yang wajib memperoleh sertifikat Manajemen Risiko cukup banyak, dengan tenggat waktu yang mendesak..

Sesuai ketentuan BNSP, sertifikat MRDP ini memiliki masa laku selama 3 tahun dan harus diperpanjang secara berkelanjutan.

POJK NOMOR 3 TAHUN 2025 TENTANG PENATALAKSANAAN LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI DI SEKTOR JASA KEUANGAN

Bulan Maret 2025 ini telah terbit POJK nomor 3 tahun 2025 tentang Penatalaksanaan LSP di Sektor Jasa

Keuangan, yang antara lain mengatur tentang bentuk hukum LSP dan persyaratan teknis lainnya. Bentuk hukum LSP yang diperbolehkan oleh POJK adalah Perseroan Terbatas atau PT, sehingga LSPDP yang saat ini berbentuk Yayasan wajib untuk berubah menjadi PT. Hal lain yang diatur disini adalah kewajiban membayar iuran kepada OJK sebesar 1% dari biaya sertifikasi yang dilaksanakan, selain kewajiban biaya pendaftaran ke OJK.

Saat ini LSPDP telah mengajukan pendaftaran ke OJK untuk diakui sebagai LSP yang terdaftar di OJK, meskipun pendaftaran sudah pernah diajukan pada tahun 2021, namun karena

skema sertifikasi yang diajukan, yaitu skema manajemen risiko Dana Pensiun belum menggunakan menggunakan SKKNI Dana Pensiun, karena memang belum terbit, maka harus menunggu SKKNI dan KKNi Dana Pensiun yang baru terbit pada tahun 2022. Skema kompetensi profesi Dana Pensiun yang mengacu pada SKKNI Dana Pensiun dan KKNi Dana Pensiun baru memperoleh persetujuan dari BNSP pada bulan Maret 2025. Dengan terbitnya lisensi dari BNSP tersebut, maka LSPDP segera mengajukan pendaftaran ke OJK sebagaimana diatur dalam POJK nomor 3 tahun 2025 tersebut. Meskipun belum terdaftar, namun sertifikasi MRDP yang

Pasal 8-11



Struktur Organisasi Kepengurusan LSP



- **Direksi/Pejabat setara** bertanggung jawab atas pengurusan dan perwakilan LSP, termasuk di dalam maupun di luar pengadilan.
- **Direksi/Pejabat setara dan unsur pelaksana dibawahnya**, harus independen dan tidak merangkap jabatan sebagai anggota direksi atau yang setara, anggota dewan komisaris atau yang setara, dewan pengawas syariah, pengawas, tenaga ahli, komite, dan pegawai pada industri jasa keuangan maupun lembaga lainnya yang dinyatakan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- **Komisaris/Pejabat setara** bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan terhadap kegiatan operasional LSP termasuk bertindak sebagai pengarah LSP.
- **Direksi & Komisaris dan Pejabat setara** harus memiliki pengalaman kerja minimal 3 tahun dalam posisi manajerial serta memiliki kompetensi di sektor jasa keuangan.
- **Direksi & Komisaris dan Pejabat setara** menjabat maksimal 5 tahun dan hanya dapat diperpanjang satu kali untuk periode yang sama.

diterbitkan oleh LSPDP tetap diakui baik oleh BNSP maupun oleh OJK, sebagai persyaratan dalam dalam pengajuan pendaftaran fit proper bagi Pihak Utama Dana Pensiun.

STRUKTUR ORGANISASI KEPENGURUSAN LSPDP

Struktur organisasi kepengurusan LSPDP mengalami perubahan, sejalan dengan perubahan yang ada di pendirinya. Seperti diketahui, kepengurusan di ADPI sesuai dengan Anggaran Dasar adalah Dewan Pimpinan masih berstatus aktif di Dana Pensiun, sehingga bila sudah tidak lagi di Dana Pensiun maka secara otomatis status kepengurusannya di ADPI juga berakhir, meskipun secara ketentuan, masa jabatan di ADPI belum berakhir. Kita saksikan seringnya terjadi pergantian antar waktu di pucuk pimpinan ADPI, karena status kepengurusannya di Dana Pensiun sudah berakhir.

Korelasinya dengan kepengurusan di LSPDP adalah sebagai Pendiri LSPDP,



UNTUK UJI KOMPETENSI, SAAT INI **LSPDP MEMILIKI 29 ORANG ASESOR YANG TERLISENSI BNSP** DAN YANG MEMILIKI PENGALAMAN DAN PENGETAHUAN TENTANG DANA PENSIUN. LISENSI ASESOR BERLAKU SELAMA 3 TAHUN DAN UNTUK PERPANJANGANNYA WAJIB MELAKUKAN RECOGNITION CURRENT COMPETENCY ATAU RCC.”

yang secara ex-officio Ketua ADPI dan Ketua P-DPLK merupakan Pendiri dalam kepengurusan LSPDP. Seperti diketahui, dalam Anggaran Dasar LspDP, kepengurusannya terdiri dari Pendiri, Pengawas dan Pengurus. Sebagai Lembaga yang berada di lingkungan BNSP, maka kepengurusannya juga wajib disesuaikan dengan ketentuan di BNSP, yaitu terdiri dari unsur Pengarah

yang terdiri dari Pendiri atau Pembina bersama dengan Pengawas. Unsur pelaksana terdiri dari Pengurus dan jajaran teknisnya, yang meliputi bidang sertifikasi, bidang manajemen mutu, bidang administrasi & keuangan, bidang skema, bidang tempat uji kompetensi atau TUK dan bidang teknis. POJK nomor 11 tahun 2021 tentang Penatalaksanaan Lembaga Sertifikasi Profesi di Sektor Jasa Keuangan juga mengatur tentang status dari personal di LSPDP, yaitu tidak boleh berstatus aktif di Lembaga Keuangan yang berada dibawah naungan OJK, dengan harapan tidak terjadi conflict of interest. Untuk uji kompetensi, saat ini LSPDP memiliki 29 orang asesor yang terlisensi BNSP dan yang memiliki pengalaman dan pengetahuan tentang Dana Pensiun. Lisensi asesor berlaku selama 3 tahun dan untuk perpanjangannya wajib melakukan Recognition Current Competency atau RCC. Semua asesor LSPDP baru saja melaksanakan RCC pada awal bulan Maret 2025.

ASESOR KOMPETENSI LSPDP

Berikut nama-nama dan riwayat singkat Asesor LSPDP



INDERAHADI

Alumni Akademi Akuntansi Universitas Jayabaya Jakarta. Berkarir di kantor berita Antara, terakhir ditugaskan sebagai Direktur Utama Dana Pensiun Antara.

ALI FARMADI

Alumni Universitas Jambi. Mengawali karir di Bank Ekspor Impor Indonesia yang kemudian menjadi Bank Mandiri. Terakhir menjabat sebagai Treasury Head Regional I Medan, sebelum ditugaskan sebagai Dana Pensiun Bank Mandiri sebagai Direktur Utama Dana Pensiun Bank Mandiri. Di Perkumpulan ADPI pernah menjabat sebagai Ketua ADPI.



ASEP KURNIAWAN

Menyelesaikan jenjang S-1 Akuntansi di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPKP Bandung, mengawali karier sebagai auditor di salah satu Kantor Akuntan Publik di Bandung, melanjutkan karier di PT. Karsa Tirta Dharma Pangada dan terakhir menjabat sebagai Manajer Keuangan di Dapenma PAMSI.



ASIWARDI GANDHI

Sarjana Psikologi lulusan Universitas Gajah Mada. Berkarir di PT Taspen, terakhir sebagai Sekretaris Perusahaan sebelum ditugaskan sebagai Direktur Utama Dana Pensiun Taspen. Saat ini menjabat sebagai Direktur Utama Dana Pensiun BASF Indonesia serta aktif sebagai Asesor di Lembaga Sertifikasi Profesi Dana Pensiun. Saat ini menjabat sebagai Staf Ahli LSPDP.



ANTONIUS TYAS RESEP ARTONO

Menyelesaikan jenjang S-1 Teknik Kimia di Fakultas Teknologi Industri Universitas 10 November Surabaya, Diploma Geothermal Engineering dari University of Auckland dan Magister of Business Administration dari University of

Missouri Saint Louis. Sempat berkarier di PT Indonesia Power dan melanjutkan di PT PLN hingga ditugaskan di Dana Pensiun PLN, saat ini menjabat sebagai Direktur Utama Dana Pensiun PLN.

BAMBANG HERWANTO

Menyelesaikan jenjang S-2 di Fakultas Bisnis Ekonomi Universitas Surabaya, Mengawali karier di PT. Manufactured of Enamel and Metal AFRO PACIFIC dan kemudian melanjutkan karier sebagai Dosen di Universitas Surabaya, pernah menjabat sebagai Direktur Politeknik Ubaya selama 2 periode dan ditugaskan sebagai Direktur Dana Pensiun



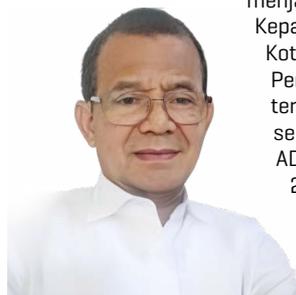
ARIF HARTANTO

Alumni ilmu hukum di Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Magister Hukum di Universitas Indonesia serta International Business IBEAR, University of Southern California, USA, Suspim Sugas BUMN Lemhannas, Jakarta. Berkarir di PT Garuda Indonesia, terakhir menjabat sebagai VP Corporate Communication sebelum penugasannya sebagai Direktur Dana Pensiun Garuda Indonesia. Menjabat sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Jakarta selama 2 periode, dari tahun 2010 sampai dengan 2019. Bertugas sebagai Ketua Lembaga Sertifikasi Profesi Dana Pensiun sampai dengan tahun 2019, saat ini menjabat sebagai Direktur Eksekutif, disamping penugasannya sebagai Pengawas di Perkumpulan ADPI sampai dengan saat ini.



BAMBANG SRI MULYADI

Alumni Fakultas Ekonomi, Universitas Prof. Dr. Moestopo, Jakarta, Magister Manajemen di Sekolah Tinggi Manajemen Labora, Jakarta. Mengawali karier di Bank Dagang Negara sampai pada jabatan Kepala Bagian Pengerahan Tenaga Kerja Pada awal merger dari 4 Legacy Bank [BBD, BDN, BEI, dan Bapindo] menjadi Bank Mandiri, bertugas menjadi Kepala Cabang Bank Mandiri di beberapa Kota sebelum ditugaskan di Dana Pensiun Bank Mandiri 2 dengan jabatan terakhir Direktur Utama. Menjabat sebagai Direktur Eksekutif Perkumpulan ADPI dari tahun 2012 sampai dengan 2020. Saat ini aktif sebagai Dosen di STIE JIC, serta sebagai Dewan Komisaris PT Multindo, juga sebagai Staf Ahli LSPDP.



BAMBANG WIBISONO

Alumni Fakultas Ekonomi Universitas Padjajaran Bandung dan Doktor dari Institut Pertanian Bogor. Berkarier di beberapa perusahaan baik nasional maupun multinasional, terakhir menjabat sebagai Vice President di PT Freeport Indonesia disamping sebagai Direktur Utama Dana Pensiun Freeport Indonesia. Saat ini menjabat sebagai Ka Bidang Teknis LSPDP.



ERNITA PUTRI

Alumni STIE Perbanas untuk jenjang S-1 Akuntansi dan S-2 Magister Manajemen. Saat ini berkarier di Dana Pensiun BNI menjabat sebagai Pemimpin Divisi Kepesertaan.

BUDI RUSENO

Alumni S-1 Kurikulum & Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta, Magister Manajemen di STIE IPWI Jakarta, Berkarier di berbagai perusahaan dengan posisi terakhir Direktur Utama Dana Pensiun Rajawali Nusantara Indonesia dan Komisaris Utama PT Rajawali Insurance Broker. Saat ini aktif sebagai pengajar di Perkumpulan ADPI.



GANIS WIDIO ANANTO

Alumni Fakultas Ekonomi Universitas Gajah Mada, mengawali karirnya di Bapindo, terakhir menjabat sebagai Direktur Dana Pensiun Mandiri 4, serta sebagai Pengelola Investama Mandiri. Saat ini menjabat sebagai Direktur Dana Pensiun BASF, juga sebagai Staf Ahli LSPDP.



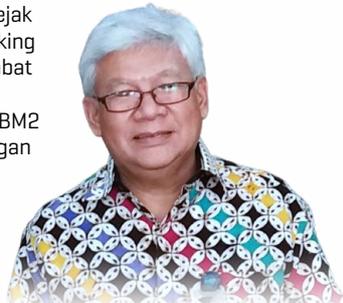
JUNAEDI A. KAELANI

Alumni Fakultas Ekonomi Akuntansi Universitas Diponegoro, mengawali karier di Bank Bumi Daya dan berlanjut di Bank Mandiri, hingga ditugaskan sebagai Direktur Dana Pensiun Bank Mandiri sejak tahun 2018 hingga sekarang.



EDI PUJIYANTO

Alumni Fakultas Ekonomi, Universitas Diponegoro, Semarang dan MBA Finance dari Saint Louis, Missouri, USA. Mengawali karirnya di Bank Dagang Negara [BDN] sebelum merger menjadi Bank Mandiri. Sejak 1999 bertugas di Corporate Banking Bank Mandiri. Selanjutnya menjabat sebagai Direktur Utama Dana Pensiun Bank Mandiri 2 Dirut DPBM2 sejak Februari 2016 sampai dengan Oktober 2022. Saat ini sebagai Ketua LSPDP. Aktif sebagai Instruktur / pengajar di Training Group Bank Mandiri.



EDY RAHARDJA

Menyelesaikan Pendidikan S-1 di Fakultas Ekonomi Universitas Tarumanegara Jakarta, Saat ini menjabat sebagai Sekretaris Dana Pensiun Baptis Indonesia.



M. JIHADI

Menyelesaikan pendidikan S-1 di Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Malang, Magister dan Program Doktor dari Universitas Airlangga Surabaya, berkarier sebagai Dosen di Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Malang dan juga ditugaskan sebagai Direktur Keuangan dan Investasi Dana Pensiun UMM. Aktif di beberapa kegiatan organisasi dan saat ini menjabat sebagai Ketua KOMDA VI Perkumpulan ADPI



NURHASAN KURNIAWAN

Saat ini sebagai Komisaris Independen dari Zurich General Takaful Indonesia dan Heksa Solution Insurance sekaligus juga menjadi CEO of APAC Insurtech Consulting Indonesia, juga sebagai Pendiri dan Komisaris Utama dari Daya Sinergi Solusi (DSS) Consulting. Alumni Universitas Indonesia untuk Sarjana Ekonomi, serta Magister Manajemen dengan konsentrasi Manajemen Pasar Modal, dan lulus pada program Doktor di bidang Manajemen Sumber Daya Manusia di Universitas Negeri Jakarta. Alumni Ketua Umum Perkumpulan DPLK ini sering bertindak selaku narasumber di berbagai seminar dan workshop.



PURWANINGSIH

Menyelesaikan S-1 Universitas Diponegoro dengan gelar Sarjana Sains, 17 tahun berkarier dalam bidang Asuransi Jiwa di PT Astra CMG Life, kemudian masuk ke industri Dana Pensiun terakhir menjabat sebagai Direktur Kepesertaan di Dana Pensiun Astra. Saat ini aktif sebagai Asesor di LSP Dana Pensiun.



R. HERNA GUNAWAN

Menyelesaikan S-1 Teknik Informatika di Sekolah Tinggi Teknologi Indonesia dan Program Magister Manajemen di Universitas Pendidikan Indonesia. Saat ini berkarier di Dana Pensiun Telkom sebagai Kepala Bagian Data Analitik, aktif sebagai Dosen Luar Biasa di STMIK Bandung dan sebagai Pengajar/ Pemateri pada Diklat Perkumpulan ADPI juga sebagai Assesor KPKU BUMN dan LSP Dana Pensiun.



SATINO

Kelahiran Wonogiri tahun 1950, menyelesaikan pendidikan S-2 Magister Manajemen di Sekolah Tinggi Manajemen PPM. Berkarier di PT Jasa Marga dengan posisi terakhir Kepala Biro Sumber Daya Manusia & Kepala Biro Keuangan sebelum ditugaskan menjadi Direktur Utama Dana Pensiun Jasa Marga. Sempat menjabat sebagai Dewan Pengawas di beberapa Dana Pensiun dan saat ini aktif sebagai Dewan Pengawas Perkumpulan ADPI. Saat ini menjabat sebagai Ketua Bidang TUK LSPDP.



SITI RAKHMAWATI

Alumni S-2 konsentrasi Finance dan memiliki Sertifikasi Profesi Chartered Financial Analyst. Berkarier di Telkom Indonesia. Saat ini menjabat sebagai Direktur Investasi Dana Pensiun Telkom, serta anggota Pengurus Bidang Investasi & Aktuaria Asosiasi Dana Pensiun Indonesia dan Head of Advocacy serta Board Member CFA Society Indonesia. Aktif menjadi narasumber di berbagai media serta acara nasional maupun internasional.



SUHERI

Alumni Institut Pertanian Bogor (IPB) dan Magister Sains Ekonomi Keuangan Syariah Universitas Indonesia, berkarier di Astra Group, sempat menangani berbagai bidang, mulai dari IT, hingga menjadi konsultan Internal Business Process Reengineering untuk berbagai jenis bisnis anak perusahaan Astra Group. Selanjutnya berkarya di Asuransi Astra yang mengepalai berbagai Divisi, mulai dari Operasional, Strategic Service, strategic Planning, Human Resources, dan terakhir mengepalai Unit Syariah Asuransi Astra, kemudian kembali ke PT. Astra International ditugaskan sebagai Chief Dana Pensiun Astra. Selain itu, aktif sebagai motivator dan sebagai penulis buku "Jangan Cuma Bermimpi, Mulai Saja!". Certified Mediator, Ajudikator, dan Arbiter Konvensional dan syariah.



SULARNO

Mengawali karir di beberapa perusahaan, masuk ke industri keuangan non bank pertama kali sebagai Direktur Umum & Keuangan pada perusahaan pembiayaan PT. Tirta Larastama Dinamika Finance. Selanjutnya bertugas sebagai Direktur Keuangan & Kepesertaan di Dana Pensiun Bersama Perusahaan daerah Air Minum Seluruh Indonesia (DAPENMA PAMSI). Saat ini menjabat sebagai Direktur Utama DAPENMA PAMSI untuk beberapa periode. Menyelesaikan Pendidikan Magister Management Keuangan, di Perkumpulan ADPI menjabat sebagai Sekretaris Perkumpulan dan pernah menjabat sebagai Ketua Lembaga Sertifikasi Profesi Dana Pensiun.





SYARIFUDIN YUNUS



Menyelesaikan pendidikan S-1 dari Universitas Pendidikan Jakarta, Magister di Universitas Kristen Indonesia dan menyelesaikan Pendidikan S-3 dari Universitas Pakuan. Pernah bekerja di Manulife, terakhir menjabat sebagai Manajer Komunikasi dan Employee Benefit, saat ini sebagai Direktur Eksekutif di Perkumpulan Dana Pensiun Lembaga Keuangan serta sebagai Pengurus LSPDP. Juga sebagai staf pengajar di beberapa perguruan tinggi.

WIDIYANTO FAJAR TRIPAMBUDI



Alumni Fakultas Hukum Universitas Jenderal Sudirman dan menyelesaikan program Magister Kenotariatan di Universitas Diponegoro. Saat ini berkarier di Dana Pensiun Perusahaan Pelabuhan dan Pengerukan. Aktif sebagai Dosen di Universitas Pamulang dan sebagai Asesor di LSP Dana Pensiun.

SRI MURTININGSIH

Alumni Fakultas Kehutanan Universitas Gajah Mada dan Magister Manajemen Institut Pertanian Bogor, berkarier di PT Perhutani terakhir sebagai Kepala Biro Pembinaan dan Fasilitas SDM sebelum kemudian bertugas sebagai Direktur Utama Dana Pensiun Perhutani, dilanjutkan sebagai Bendahara di Yayasan Kesejahteraan Pegawai Perhutani. Sebagai Asesor LSPDP tahun 2015, namun sempat terhenti karena tidak bisa mengikuti RCC tahun 2018, tahun 2025 bergabung kembali sebagai Asesor LSPDP setelah mengulangi pelatihan sebagai asesor.



DR. DRS. YUNI PRATIKNO, S.E.,MM.,MH



Menyelesaikan Pendidikan S-1 di Universitas Sanata Dharma Yogya, Juga dalam bidang HRD dari IMMI Jakarta serta Doktor dari Universitas Negeri Jakarta. Terakhir menjabat sebagai Direktur Utama Dana Pensiun Essence Indonesia, saat ini menjabat sebagai Wakil Rektor di STAMI Jakarta. Aktif mengajar di sejumlah perguruan tinggi diantaranya adalah Universitas Pertahanan. Saat ini menjabat sebagai Komite Skema LSPDP.



VERA LOLITA

Menyelesaikan Pendidikan S-1 Akuntansi. Berkarier di Dapenma PAMSI sampai dengan saat ini.

ZAIN ZAINUDDIN

Menyelesaikan pendidikan S-1 di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, dan Magister di Institut Teknologi Bandung, Berkarier di PT Angkasa Pura II terakhir menjabat VP of Accounting and Budgeting kemudian ditugaskan di Dana Pensiun Angkasa Pura II terakhir menjabat sebagai Direktur Utama. Aktif sebagai Dosen di Institut Transportasi dan Logistik Trisakti dan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Syech Yusuf Tangerang.



MEMBANGUN BUDAYA SADAR RISIKO DENGAN MENGIDENTIFIKASI LOSS EVENT DATABASE (LED)

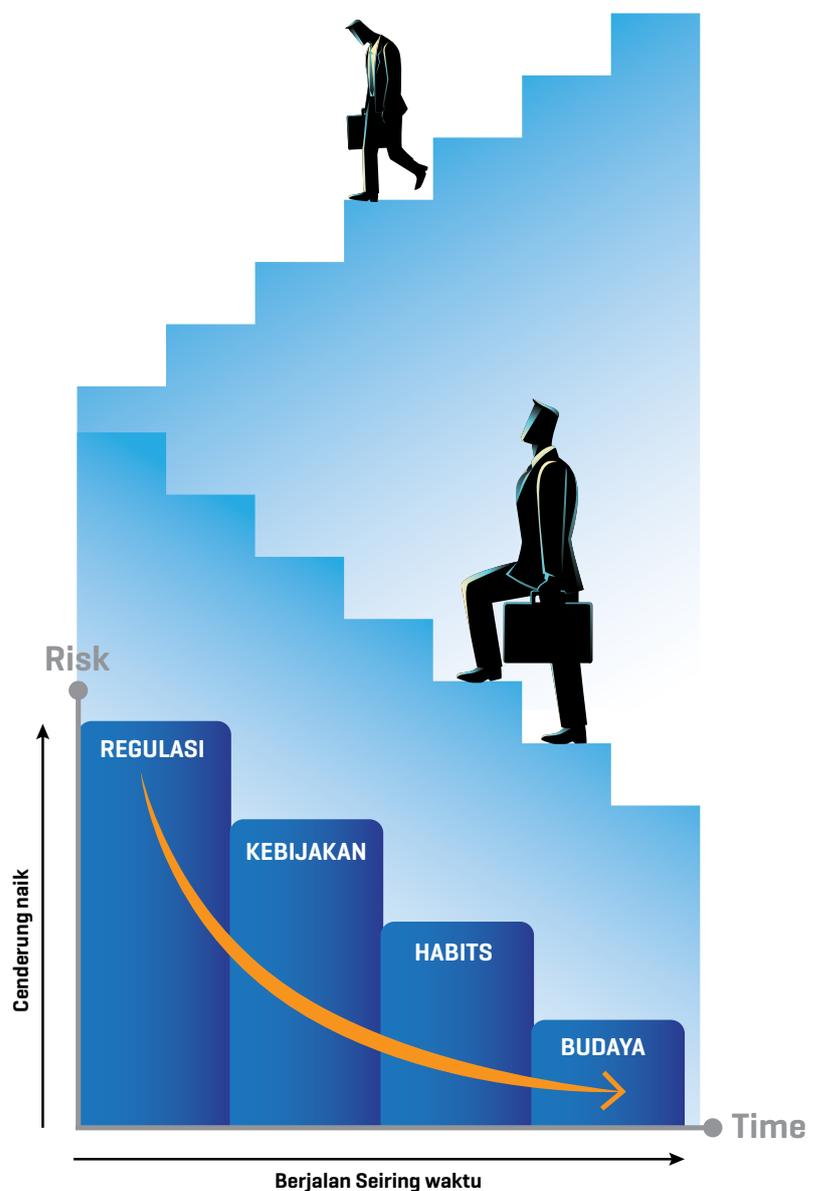


Oleh : **R Herna Gunawan**
[Dana Pensiun Telkom]

PENDAHULUAN

Manajemen Risiko merupakan suatu proses mengidentifikasi, menilai, mengelola, dan mengendalikan peristiwa atau situasi potensial untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tujuan.

Perjalanan bisnis perusahaan sering diwarnai dengan berbagai kejadian terkait dengan risiko operasional dan risiko keuangan termasuk diantaranya perusahaan asuransi, penjaminan dan Dana Pensiun. **Risiko murni** merupakan kemungkinan kerugian atau ketidakpastian yang tidak dapat dihindari dan tidak dapat dihubungkan dengan peluang keuntungan, dalam konteks bisnis dan keuangan, risiko murni bersifat **inheren** dalam setiap kegiatan bisnis dan tidak dapat dihilangkan tetapi dampak negatifnya dapat diminimalkan atau dikelola secara efektif. Risiko murni melibatkan faktor-faktor eksternal atau internal yang dapat mempengaruhi kinerja keuangan atau kelangsungan operasional suatu Perusahaan. Risiko murni dapat berasal dari berbagai sumber, termasuk perubahan dalam kondisi pasar, perubahan regulasi, bencana alam, musibah atau faktor internal seperti kesalahan manusia atau kegagalan sistem. **Risiko spekulatif** merupakan risiko yang paling sering dihadapi oleh organisasi atau individu karena muncul dari **keputusan yang disengaja/ dibuat** di mana hasil akhirnya bisa berupa keuntungan (opportunity) atau kerugian (lost). Misal organisasi me-



Gambar 1: Risiko dan Waktu

Dokumen Kerugian Kejadian

Unit :
Tahun :
Periode :

IDENTIFIKASI RISIKO							ANALISA DAMPAK									
NO	Sasaran	Jenis Risiko	Nama Risiko	Deskripsi Peristiwa Risiko	Akar Penyebab Risiko	Key Risk Indicator (KRI)	Lokasi Kejadian	Periode	Dampak	Proabilitas	Nilai Eksposur Risiko	Level Risiko	Nilai Dampak Kerugian	Deskripsi Dampak Kerugian	Rencana Mitigasi	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	10		11	12	13	14	15	16	17	18
RO-1	Pembayaran Manfaat Pensiun Tepat Waktu, Tepat Jumlah, dan Tepat Penerima	Risiko Operasional	Kelebihan pembayaran manfaat pensiun	Kelebihan pembayaran manfaat pensiun kepada pihak yang tidak berhak	Pensiun meninggal tidak dilaporkan	Kelebihan pembayaran manfaat pensiun	Surabaya	2022/04/01	4	3	12	Sedang Tinggi	56 Juta Rupiah	Tepat Penerima dan Tepat Jumlah tidak tercapai	Melakukan evaluasi terhadap proses pengkinian data yang telah dilakukan saat ini	Kelebihan bayar sudah terjadi selama 18 bulan

Gambar 2: Contoh dokumen LED

mutuskan dalam portofolio investasinya pada transaksi saham, nilai investasi pada saham di masa depan mungkin terjadi adalah untung, rugi, atau sama sekali tidak berubah. Kemungkinan tersebut bersifat spekulatif dan sudah disadari sebelum membeli.

BUDAYA SADAR RISIKO

Budaya sadar risiko (Risk Aware Culture) menciptakan fondasi yang kokoh bagi keberlanjutan dan kesuksesan organisasi. Konsep ini memberikan pemahaman kolektif akan risiko sebagai bagian tak terpisahkan dari aktivitas sehari-hari. Setiap individu dalam organisasi tidak hanya menyadari potensi risiko yang terkait dengan tindakan, tetapi juga berperan aktif dalam mengidentifikasi, menilai, dan mengelola risiko tersebut.

Budaya sadar risiko dapat membuat organisasi mengurangi ketidakpastian, menjadi proaktif mengatasi tantangan, dan meningkatkan daya saing. Pentingnya budaya ini juga tercermin dalam kemampuannya mencegah kerugian finansial, mengelola reputasi organisasi, dan memperkuat kepercayaan pemangku kepentingan. Dengan komitmen kuat dari pemimpin dan partisipasi aktif dari semua pegawai/ karyawan, organisasi dapat mencapai ketangguhan yang lebih baik terhadap perubahan dan ketidakpastian yang mungkin dihadapi.

Risiko cenderung naik dan akan berjalan sepanjang waktu, maka perlu

ada pengendalian dengan penguatan regulasi, pedoman pelaksanaan dalam suatu kebijakan, proses manajemen risiko harus diterapkan dalam keseharian dan menjadi suatu kebiasaan dan budaya risiko.

Manfaat dari budaya sadar risiko dalam suatu organisasi mencakup beberapa aspek yang secara positif memengaruhi kesiapan, keefektifan, dan keberlanjutan bisnis jangka panjang.

1. Meningkatkan Kesiapan Menghadapi Risiko

Meningkatkan kesiapan organisasi dalam menghadapi risiko. Dengan adanya pemahaman yang mendalam mengenai potensi risiko, organisasi dapat mengambil tindakan proaktif untuk mengidentifikasi, menilai, dan merespons risiko yang mungkin timbul. Ini menciptakan lingkungan di mana organisasi lebih siap dan mampu menghadapi tantangan, mengurangi ketidakpastian dalam pengambilan keputusan, dan memperkuat ketahanan organisasi terhadap perubahan eksternal.

2. Meminimalkan Dampak Risiko yang Terjadi

Membantu meminimalkan dampak risiko yang terjadi. Dengan pemahaman yang terintegrasi tentang risiko di semua tingkatan organisasi, upaya dapat difokuskan pada mitigasi risiko, yang artinya organisasi lebih mampu mengendalikan

dan mengurangi dampak negatif yang dapat terjadi. Hal ini tidak hanya mengurangi kerugian finansial tetapi juga melindungi reputasi organisasi dan menjaga kepercayaan pemangku kepentingan

3. Meningkatkan Keberlanjutan Bisnis Jangka Panjang

Dengan mengelola risiko secara efektif, organisasi dapat menghindari skenario yang dapat mengancam kelangsungan operasionalnya. Ini menciptakan dasar yang lebih stabil untuk pertumbuhan jangka panjang, mengoptimalkan peluang, dan memberikan kepercayaan kepada pemangku kepentingan bahwa organisasi memiliki kontrol yang baik terhadap dinamika risiko di lingkungannya

4. Database kejadian kerugian

Database kejadian kerugian (loss event database - LED) merupakan data kerugian, yang pernah dialami perusahaan, dicatat secara sistematis dengan klasifikasi tertentu. Pencatatan data tersebut dapat menjadi data statistik yang selanjutnya digunakan sebagai dasar untuk menentukan estimasi risiko empiris, sebagai penghubung antara pengalaman kerugian, dengan keputusan pengendalian risiko operasional dan risiko lainnya, dan sebagai alat validasi input dan output dari sistem pengukuran modal untuk menutup risiko perusahaan. Sumber data internal yang

dijadikan acuan dalam memperoleh loss event dapat berasal dari hasil audit intern maupun ekstern, hasil identifikasi risiko maupun sumber-sumber lainnya.

Tanpa basisdata kejadian kerugian suatu institusi, akan mengalami kesulitan dalam penyusunan model pengukuran kerugian risiko. Di samping itu, database kerugian dapat menjadi alat untuk melakukan validasi setiap proses penilaian risiko atau sebagai prediksi risiko

Data kerugian yang dimiliki perusahaan harus komprehensif dimana data tersebut menjangkau seluruh aktivitas dan eksposur yang material dari seluruh unit kerja. Unit Manajemen Risiko menetapkan kriteria spesifik untuk menetapkan data kerugian yang timbul dari suatu kejadian, atau suatu aktivitas yang melibatkan berbagai lini bisnis. Kriteria dimaksud termasuk menetapkan batasan tingkat materialitas kerugian yang dianggap

dasar perumusan pengendalian dan/ atau inovasi pengendalian risiko tahun berjalan.

Pengumpulan LED ini merupakan salah satu aktivitas Manajemen Risiko Korporat. Maksud dilaksanakannya pengumpulan LED ini adalah mencatat dan mengelola data kejadian/insiden kerugian (Loss Event) yang telah terjadi dalam finansial dan non finansial atau dengan kata lain operasional dan non operasional perusahaan. Tujuan pencatatan data loss event adalah dasar untuk perkiraan risiko empiris, sebagai alat untuk memvalidasi input dan output dari sistem pengukuran risiko korporat, atau sebagai penghubung antara pengalaman kerugian dengan manajemen risiko serta keputusan pengendalian agar kejadian kerugian tersebut tidak terulang kembali. Dalam melakukan perkiraan risiko empiris tersebut, perusahaan dapat pula menggunakan data eksternal guna melengkapi

Kejadian kerugian harus dapat didefinisikan dengan jelas, dan harus dapat dipastikan bahwa kejadian tersebut sudah teridentifikasi dan sudah dilakukan rencana tindak lanjut yang diperlukan. Contoh peristiwa kerugian yaitu kelebihan membayarkan manfaat pensiun yang diakibatkan karena pensiunan sudah meninggal dunia dan tidak ada yang melaporkan, manfaat pensiunnya setiap bulan terus dibayarkan.

Pengumpulan data loss event dari kegiatan operasional merupakan hal penting untuk pengembangan sistem pengukuran risiko operasional kedepannya, sehingga akan lebih efektif.

Upaya pencegahan potensi kerugian dengan LED memerlukan pencatatan data kerugian dari masing-masing pemilik risiko. Pencatatan ini dilakukan sebagai bahan pembelajaran agar kerugian yang sudah terjadi tidak terulang, dan sebagai dasar menetapkan tindakan mitigasi risiko secara tepat. Pencatatan LED ini harus menjadi suatu kebiasaan dan budaya di lingkungan organisasi masing-masing karena kita berangkat dari suatu kesalahan untuk melangkah dengan lebih baik ke depannya.

PENUTUP

Risiko merupakan bagian yang tak terpisahkan dari dunia bisnis, menghadirkan tantangan yang perlu dihadapi dan peluang yang perlu dioptimalkan sehingga harus dikelola dengan bijaksana.

Budaya Sadar Risiko merupakan suatu pola perilaku di mana semua personal mempertimbangkan risiko dalam mengambil keputusan dan cara melakukan pekerjaan secara berkelanjutan. Ini menciptakan landasan yang kokoh bagi kesuksesan organisasi, di mana kesadaran tentang risiko dan pengelolaan risiko yang proaktif menjadi bagian tidak terpisahkan dari setiap tindakan dan Keputusan. Semoga bermanfaat buat rekan-rekan. □



BUDAYA SADAR RISIKO MERUPAKAN SUATU POLA PERILAKU DI MANA **SEMUA PERSONIL MEMPERTIMBANGKAN RISIKO** DALAM MENGAMBIL KEPUTUSAN DAN CARA MELAKUKAN PEKERJAAN SECARA BERKELANJUTAN.”

layak untuk dicatat secara internal. Batasan ini bisa berbeda dari satu perusahaan dengan perusahaan lain, ataupun pada lini bisnis yang berbeda dalam satu industri yang sama, namun batasan tersebut secara garis besar harus konsisten dengan yang digunakan oleh perusahaan lain yang sama bisnisnya.

LED merupakan dokumen yang berisi catatan kejadian kerugian yang pernah terjadi baik pada tahun berjalan maupun tahun sebelumnya. LED digunakan dalam rangka menentukan ukuran kemungkinan, dampak, kapasitas, toleransi, dan selera risiko yang diharapkan. Rincian mitigasi dan kondisi setalah mitigasi digunakan sebagai

data internal perusahaan yang telah diorganisasikan.

Peristiwa yang dikategorikan sebagai kerugian (loss) adalah peristiwa yang masuk kategori down sides risks yaitu peristiwa yang telah memberikan dampak kerugian baik secara finansial maupun non finansial. Upaya pencegahan potensi kerugian dengan LED memerlukan pencatatan data kerugian internal, artinya kerugian tergolong risiko operasional dan keuangan yang terjadi pada perusahaan. Pencatatan ini dilakukan sebagai bahan pembelajaran agar kerugian yang sudah terjadi tidak terulang, dan sebagai dasar menetapkan tindakan mitigasi risiko.

LSPDP SELenggarakan UJIAN SERTIFIKASI MUDP

Bertempat di Hotel Mercure Yogya, Sabtu 8 Maret 2025 telah diselenggarakan ujian Sertifikasi MUDP bagi peserta dari Bank Jatim. 10 peserta sudah menjalani pelatihan selama 2 hari yaitu tanggal 6 dan 7 Maret 2025. Dari 10 Peserta, semuanya dinyatakan Lulus.

UJIAN SERTIFIKAS MUDP UNTUK DAPEN PERTAMINA

Sabtu 22 Maret 2025, LSPDP menyelenggarakan ujian MUDP bagi seorang personal Pertamina, yang diarahkan untuk menjabat sebagai Dewan Pengawas Dapen Pertamina. Ujian diselenggarakan di kantor Dapen Pertamina, Jl. M Ridwan Rais Jakarta Pusat. Setelah menjalani pelatihan selama 2 hari, dalam ujian peserta dinyatakan lulus.

29 orang Asesor LSPDP yang sertifikatnya sudah berdurasi 3 tahun, wajib menjalani RCC untuk perpanjangannya sebagai Asesor BNSP. Tanggal 3 dan 4 Maret 2025, telah diselenggarakan RCC dengan nara sumber dari BNSP, dilaksanakan di Function Hall Wisma 46. Ada 1 orang asesor yang sebelumnya sertifikatnya telah kedaluwarsa, namun setelah menjalani pelatihan ulang dan ikut serta RCC, dinyatakan lulus. Selamat ibu Naning, selamat datang kembali di LSPDP.

Setelah kegiatan RCC, maka dilanjutkan dengan kegiatan “witness”, yaitu simulasi asesmen dengan disaksikan oleh master asesor dan pejabat BNSP. Sebagai kelanjutan dari RCC ini, Komisioner BNSP yang terdiri dari Ketuanya, Bpk. Syamsi Hari dan 2 orang Komisioner, Bpk Aji Martono dan Bpk. Muh. Nur Hayid berkunjung ke LSPDP dan memberikan pencerahan kepada para Asesor. Ada satu lagi kegiatan yang harus dilakukan dalam kaitan dengan RCC ini, yaitu yang disebut dengan “peer to peer assesment”, yaitu simulasi sertifikasi antar asesor, dimana seseorang asesor bertindak sebagai asesor dan juga sebagai asesi, dengan menggunakan form-form baru yang diajarkan waktu RCC. Ada 19 asesor yang ikut di kegiatan ini, dan 10 orang asesor lainnya akan dijadwalkan dalam waktu yang ditentukan. Kegiatan ini sangat

RCC ,WITNESS DAN PEER TO PEER UNTUK ASESOR LSPDP



penting karena LSPDP akan segera menyelenggarakan sertifikasi Profesi Dana Pensiun sebagaimana diatur dalam SKKNI Dana Pensiun. Banyak hal baru yang diperoleh dari kegiatan

ini, antara lain adalah form-form baru yang harus dipergunakan dalam proses sertifikasi selanjutnya.

Semoga LSPDP selalu sukses, aamiin.

NGABUBURIT BARENG ASOSIASI DPLK: "MUDA PRODUKTIF, TUA AKTIF: RAHASIA HIDUP BERKUALITAS DI MASA PENSIUN"

Pada 13 Maret 2025, Asosiasi Dana Pensiun Indonesia (ADPI) bersama Asosiasi Dana Pensiun Lembaga Keuangan (ADPLK) menggelar acara Ngabuburit Bareng dengan tema "Muda Produktif, Tua Aktif: Rahasia Hidup Berkualitas di Masa Pensiun" di Kantor Pusat DPLK Astra yang berlokasi di Pondok Indah Office Tower 3. Acara ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya perencanaan pensiun sejak dini agar masa tua tetap sejahtera dan aktif.

Dalam suasana santai menjelang waktu berbuka, para peserta yang terdiri dari perwakilan Perkumpulan ADPI dan juga Perkumpulan DPLK berdiskusi secara interaktif dengan narasumber yaitu Ketua Perkumpulan ADPI Bapak Abdul Hadi dan Ketua Asosiasi DPLK Bapak Tondy Suradiredja.

Selain sesi diskusi, acara juga diisi dengan tausiyah inspiratif yang mengingatkan pentingnya keseimbangan antara



persiapan finansial dan kebahagiaan di masa pensiun. Suasana semakin hangat ketika seluruh peserta berbuka puasa bersama, mempererat silaturahmi, dan memperkuat kolaborasi antar pemangku kepentingan dalam industri Dana Pensiun.



HALAL BIHALAL ADPI PASCA IDULFITRI 1446 H

Dalam rangka mempererat tali silaturahmi pasca Idulfitri 1446 H, Asosiasi Dana Pensiun Indonesia (ADPI) menyelenggarakan acara Halal Bihalal pada Rabu, 16 April 2025. Kegiatan ini menjadi momen kebersamaan bagi para pelaku industri dana pensiun untuk saling memaafkan, memperkuat sinergi, serta memperkuat komitmen dalam memajukan sektor dana pensiun di Indonesia.

KUNJUNGAN KOMSIONER BNSP KE LSPDP

Selasa 11 Maret 2025, LSPDP mendapat kehormatan kunjungan dari BNSP, kali ini ada 3 Komisioner yang berkunjung, yaitu Ketua Bpk Syamsi Hari, Bpk Aji Martono dan Bpk Moh. Nur Hayid. Turut menyambut kunjungan ini ada lah Ketua ADPI bapak Abdul Hadi dan Ketua Perkumpulan DPLK bpk Tondi, Pembina dan Pengurus LSPDP serta para asesor LSPDP. Pak Syamsi Hari menjelaskan keberadaan BNSP serta berbagai masalah yang menyangkut LSP, seperti keaktifan LSP, bahkan ada LSP

yang dibekukan karena tidak menjalankan asesmen.

Pak Nurhayid menjelaskan proses sertifikasi, mulai dari pengajuan pendaftaran sampai dengan keputusan kelulusan. Dalam proses sertifikasi, asesor sebatas menyampaikan hasil asesmennya, yaitu usulan kompeten atau belum kompeten, sedangkan kelulusan diputuskan dalam Rapat Pengurus dengan dihadiri oleh Bidang Teknis serta asesor yang tidak ikut dalam proses sertifikasi.



Komisioner BNSP, **pak Aji Martono**



Ketua BNSP, **pak Syamsi Hari**

MUSYAWARAH NASIONAL (MUNAS) TAHUNAN I/2025 ADPI

Jakarta, 23 April 2025 – Perkumpulan ADPI telah menyelenggarakan Musyawarah Nasional (Munas) Tahunan I/2025 pada tanggal 23 April 2025 bertempat di Hotel Bidakara, Jakarta. Munas Tahunan I/2025 diikuti oleh Dewan Pimpinan Pusat dan Pengurus Komda I s.d. VIII Perkumpulan ADPI. Kegiatan ini merupakan kegiatan rutin tahunan dengan agenda utama menyampaikan laporan pertanggungjawaban program kerja dan keuangan tahun 2024.



SEMINAR NASIONAL ADPI

Perkumpulan ADPI telah menyelenggarakan Seminar Nasional pada tanggal 24 April 2025 di Ballroom Birawa – Hotel Bidakara, Jakarta, dengan mengusung tema “**Tantangan Penguatan Dana Pensiun dalam Mewujudkan Dana Pensiun yang Berkelanjutan**”. Acara dibuka dengan Keynote Speech oleh Bapak Iwan Pasila, selaku Deputi Komisioner Bidang Pengawasan Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK, yang menekankan pentingnya penguatan tata kelola dan inovasi dalam pengelolaan dana pensiun di Indonesia.

Seminar ini menghadirkan dua narasumber yaitu Bapak Pandu Patria Sjahrir, B.A., M.B.A. (Chief Investment Officer Badan Pengelola Investasi Danantara), dan Dr. Ir. Anton Henranata, M.Si, (Chief Economist Bank BRI dan Direktur Utama BRI Research Institute) yang membahas outlook ekonomi Indonesia tahun 2025. Diskusi berlangsung dinamis dengan panduan moderator Bapak Chairi Pitono (Wakil Ketua Perkumpulan ADPI dan Presiden Direktur Dana Pensiun Astra Dua).

Seminar Nasional ini diikuti kurang lebih 230 peserta oleh pelaku industri dana pensiun, regulator, akademisi, dan pemangku kepentingan lainnya dengan harapan menjadi momentum untuk mendorong langkah konkret dalam mewujudkan dana pensiun yang kuat dan berkelanjutan di Indonesia.





MUSYAWARAH NASIONAL LUAR BIASA (MUNASLUB) ADPI TAHUN 2025

Jakarta, 24 April 2025 – Perkumpulan ADPI telah menyelenggarakan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) pada tanggal 24 April 2025 bertempat di Birawa Assembly Hall Bidakara Jakarta yang diikuti oleh Pengurus Dana Pensiun anggota ADPI. Munaslub dilaksanakan setiap empat tahun sekali untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban Pengurus, dan memilih Ketua dan Pengurus ADPI yang baru.

Pada Munaslub tahun ini menunjuk dan mengangkat Dewan Pengawas Perkumpulan ADPI yaitu: Bapak Mudjiharno M. Sudjono, Bapak Suheri, dan Bapak Ali Farmadi. Selain itu, para peserta secara mufakat menetapkan Bapak Abdul Hadi sebagai Ketua Perkumpulan ADPI untuk masa bakti 2025 – 2029. Terpilihnya kembali Bapak Abdul Hadi mencerminkan kepercayaan dan dukungan penuh dari anggota atas kepemimpinan beliau dalam memajukan industri dana pensiun di Indonesia. Selamat bertugas kepada para Pengurus dan Dewan Pengawas terpilih.

ASOSIASI DANA PENSIUN INDONESIA GELAR DISKUSI STRATEGIS DENGAN WORLD BANK MENGENAI PENGEMBANGAN VENTURE CAPITAL



Jakarta, 21 Maret 2025 – Asosiasi Dana Pensiun Indonesia (ADPI) sukses menggelar diskusi strategis bertajuk “World Bank Visits: Venture Capital Development” pada tanggal 21 Maret 2025. Kegiatan ini berlangsung di Wisma 46 Kota BNI dan dihadiri oleh beberapa pemangku kepentingan dari industri Dana Pensiun, serta perwakilan dari World Bank. Diskusi ini bertujuan untuk membahas peluang dan tantangan dalam investasi di kelas aset venture capital (VC), serta bagaimana dana pensiun dapat berperan dalam mendukung pertumbuhan sektor ini.



ADPI

KALENDER PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PERKUMPULAN ADPI **TAHUN 2025**

SERTIFIKASI

NO	PELATIHAN	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGST	SEP	OKT	NOV	DES	BIAYA
1	MANAJEMEN UMUM DANA PENSIUN	7 - 9	4 - 6	-	14 - 16	6 - 8	10 - 12	1 - 3	5 - 7	9 - 11	7 - 9	4 - 6	2 - 4	5.500.000
2	MANAJEMEN RISIKO DANA PENSIUN	21 - 23	18 - 20	-	28 - 30	19 - 21	17 - 19	15 - 17	19 - 21	23 - 25	21 - 23	18 - 20	9 - 11	4.750.000
3	PASAR MODAL	14 - 16	-	-	-	6 - 8	-	-	12 - 14	-	-	-	9 - 11	9.000.000

NON-SERTIFIKASI

NO	PELATIHAN	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGST	SEP	OKT	NOV	DES	BIAYA
1	MANAJEMEN INVESTASI DANA PENSIUN	-	11 - 12	-	-	20 - 21	-	22 - 23	-	-	14 - 15	-	-	4.000.000
2	MANAJEMEN TEKNOLOGI INFORMASI DANA PENSIUN	-	-	-	29 - 30	-	3 - 4	-	-	-	-	11 - 13	-	4.000.000
3	AKUNTANSI DAN PERPAJAKAN DANA PENSIUN	22 - 23	-	-	-	-	18 - 19	-	-	-	28 - 29	-	-	4.000.000
4	MANAJEMEN PENDANAAN DAN KEPESERTAAN DANA PENSIUN	-	25 - 26	-	-	26 - 27	-	29 - 30	-	16 - 17	-	-	-	4.000.000
5	PENYUSUNAN RENCANA BISNIS TAHUNAN DANA PENSIUN	-	-	-	-	-	24 - 25	-	-	17 - 18	-	-	-	4.000.000

Catatan:

- (1) Biaya pendaftaran pelatihan di atas, belum termasuk PPh 23 sebesar 2% yang menjadi kewajiban Pendaftar,
- (2) Semua pelatihan dalam kalender diklat dan workshop Perkumpulan ADPI akan mendapatkan Sertifikat Pengetahuan Berkelanjutan Bidang Dana Pensiun,
- (3) Penyelenggaraan In House Training / Private Class di luar jadwal kaldik Perkumpulan ADPI akan diatur secara tersendiri, silahkan menghubungi email diklat@adpi.or.id



INFORMASI LEBIH LANJUT:

Mengenai formulir pendaftaran dan teknis pelaksanaan bisa hubungi

Contact Person: **Marissa/Nisa**: 021-2514761/62 • diklat@adpi.or.id